

**KERJA SAMA MULTILATERAL G20 DALAM MENDUKUNG  
PEMULIHAN NEGARA-NEGARA RENTAN  
TERHADAP PANDEMI COVID-19**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

**RAHMIYANI AUDITIA SUHERMAN**

**4519023017**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BOSOWA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini:

Judul : Kerja Sama Multilateral G20 dalam Mendukung Pemulihan Negara-Negara Rentan terhadap Pandemi Covid-19

Nama Mahasiswa : **Rahmiyani Auditia Suherman**

Nomor Stambuk : **4519023017**

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

Makassar, 23 Februari 2023

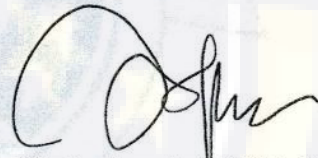
Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Arief Wicaksono, S. IP., MA.**

**NIDN. 0927117602**

  
**Muh. Asy Ari, S.IP., MA.**

**NIDN. 0908088801**


Mengetahui,

Dekan FISIP  
Universitas Bosowa

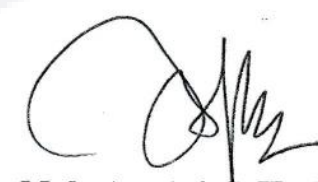
Ketua Jurusan

Ilmu Hubungan Internasional



  
**Dr. A. Burchanuddin, S. Sos., M. Si.**

**NIDN. 0905107005**

  
**Muh. Asy Ari, S. IP., MA.**

**NIDN. 0908088801**

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dengan Judul Skripsi **Kerja Sama Multilateral G20 dalam Mendukung Pemulihan Negara-Negara Rentan terhadap Pandemi Covid-19.**

Nama Mahasiswa : **Rahmiyani Auditia Suherman**

Nomor Stambuk : **4519023017**

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

Makassar, 23 Februari 2023

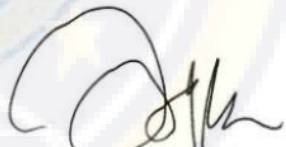
**Pengawas Umum:**

  
Dr. A. Burchanuddin, S. Sos., M. Si.

**Panitia Ujian:**

  
Arief Wicasono, S. IP., M. A.


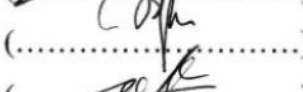
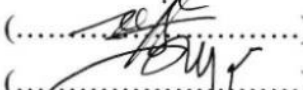
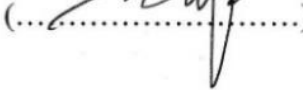
Ketua

  
Muh. Asy'ari, S. IP., M. A.

Sekretaris

**Tim Penguji:**

1. Arief Wicasono, S. IP., M. A.
2. Muh. Asy'ari, S. IP., M. A.
3. Zulkhair Burhan, S. IP., M. A.
4. Ayu Kartika J.T., S. IP., M. A.

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmiyani Auditia Suherman  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Kerja Sama Multilateral G20 dalam Mendukung Pemulihan Negara-Negara Rentan terhadap Pandemi Covid-19

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan dari orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat ahli dan rujukan lain (seperti penelitian sebelumnya dan jurnal-jurnal) dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila penelitian skripsi ini terbukti merupakan duplikat atau plagiasi dari hasil karya peneliti lain atau dengan sengaja mengajukan karya penelitian lain, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Makassar, 8 Maret 2023

Peneliti



Rahmiyani Auditia Suherman

NIM. 4519023017

## ABSTRAK

### KERJA SAMA MULTILATERAL G20 DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN NEGARA-NEGARA RENTAN TERHADAP PANDEMI COVID-19

Oleh:

Rahmiyani Auditia Suherman  
4519023017

**Latar Belakang.** Ekonomi global yang berkontraksi akibat pandemi Covid-19 telah menyebabkan sebagian besar negara-negara rentan menghadapi situasi krisis yang mencekam. Adanya keterbatasan ruang fiskal negara berpenghasilan rendah dan menengah menyebabkan pemulihan cukup sulit dilakukan untuk dapat mengatasi tantangan kesehatan dan ekonomi yang terjadi di negara-negara tersebut. Dalam hal ini, negara-negara rentan memerlukan penanganan segera untuk mencegah dampak pandemi mengancam struktur sosial-ekonomi dan sistem kesehatan. Urgensi kesehatan, sosial, dan ekonomi ini membutuhkan tindakan multilateral untuk mendukung pemulihan negara-negara rentan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kerja sama multilateral G20 dalam mendukung pemulihan negara-negara rentan akibat pandemi Covid-19.

**Metode.** Penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif kualitatif. Upaya G20 ditujukan pada aspek respon kesehatan dan pemulihan ekonomi yang didasarkan pada komitmen Rencana Aksi G20. Penelitian ini menggunakan konsep multilateralisme melalui indikator ketidakterpisahan (*indivisibility*) dan manfaat yang setara (*diffuse reciprocity*) untuk menjabarkan implementasi komitmen G20.

**Hasil.** Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kerjasama multilateral G20 dalam mendukung pemulihan di negara-negara rentan belum dilaksanakan secara optimal pada komitmen ACT-A dan COVAX serta DSSI. Tetapi, komitmen *Pandemic Fund* masih diharapkan dapat mencapai tujuan.

**Kesimpulan.** Ketidakterpisahan kepentingan dan manfaat yang setara G20 melalui komitmen Rencana Aksi G20 pada upaya mendukung pemulihan negara-negara rentan tidak terimplementasikan secara optimal.

**Kata Kunci:** G20, Negara Rentan, Respon Kesehatan, Pemulihan Ekonomi

## ABSTRACT

### **G20 MULTILATERAL COOPERATION IN SUPPORTING THE RECOVERY OF VULNERABLE COUNTRIES TO THE COVID-19 PANDEMIC**

By:

Rahmiyani Auditia Suherman  
4519023017

**Background.** The contraction of the global economy due to the Covid-19 pandemic has caused most vulnerable countries to face a gripping crisis situation. The limited fiscal space of low- and middle-income countries make recovery quite difficult to overcome the health and economic challenges that occur in these countries. In this case, vulnerable countries require immediate action to prevent the impact of the pandemic from threatening socio-economic structures and health systems. This health, social and economic urgency requires multilateral action to support the recovery of vulnerable countries. The purpose of this research is to examine G20 multilateral cooperation in supporting the recovery of vulnerable countries due to the Covid-19 pandemic.

**Methods.** This research is a qualitative descriptive research. G20 efforts are aimed at aspects of health response and economic recovery based on the G20 Action Plan commitment. This study uses the concept of multilateralism through indicators of indivisibility and diffuse reciprocity to describe the implementation of G20 commitments.

**Results.** Based on the results of the analysis, it shows that the G20 multilateral cooperation in supporting recovery in vulnerable countries has not been implemented optimally in the ACT-A and COVAX and DSSI commitments. However, the Pandemic Fund commitment is still expected to achieve its goals.

**Conclusion.** The indivisibility and diffuse reciprocity of the G20 through the G20 Action Plan commitments in supporting the recovery of vulnerable countries is not optimally implemented.

**Keywords:** G20, Vulnerable Countries, Health Response, Economic Recovery

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Kerja Sama Multilateral G20 dalam Mendukung Pemulihan Negara-Negara Rentan terhadap Pandemi Covid-19” untuk memenuhi persyaratan mencapai pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

Melalui kesempatan ini terkhusus penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta **Dr. H. Suherman Parab, S.Ag., M. M.** dan Ibunda tercinta **Hj. Hasanah, S. Pd.** yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan, serta memberikan kasih sayang dan doa restu yang tiada henti kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara penulis, yaitu **Agus Salim, Khairunnisa, Rahmayana Audita,** dan **Ahmad Miftahul Khair** atas cinta, kasih sayang, doa dan kebersamaannya yang tak tergantikan juga kepada seluruh keluarga besar penulis atas dukungan, bimbingan, dorongan, arahan, motivasi serta nasihat yang senantiasa diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka.

Terima kasih serta penghargaan yang tak terhingga penulis ucapkan kepada **Arief Wicaksono, S. IP., MA.** selaku pembimbing I dan **Muh. Asy'ari, S. IP., MA.** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengarahkan serta membimbing penulis dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran serta kesungguhan hati dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada **Zulhair Burhan, S. IP., MA.** dan **Ayu Kartika J. T., S. IP., MA.** selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritik, saran, serta arahan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M. Si. selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Dr. A. Burchanuddin, S. Sos., M. Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
3. Dr. Hj. Asmirah, M. Si. selaku Wakil Dekan I dan Zulhair Burhan, S. IP., MA. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa
4. Muh Asy'ari, S. IP., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yang telah banyak membagi ilmunya dan membantu penulis dalam hal apapun.
6. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administrasi penulis.
7. Lembaga kemahasiswaan yang menjadi tempat penulis belajar dan mengembangkan diri, yakni HIMAHl dan FPCI Chapter Universitas Bosowa.
8. Sahabat karib penulis, yaitu Nurhikmah Zainuddin dan Chantika Aulia Islamiyah yang selalu ada dalam suka maupun duka selama di bangku perkuliahan, serta Ihyar Wahyudi, Tarmizi Hanafi, dan Firman Hasyim yang selalu menjadi bagian dalam berbagi cerita selama perkuliahan.

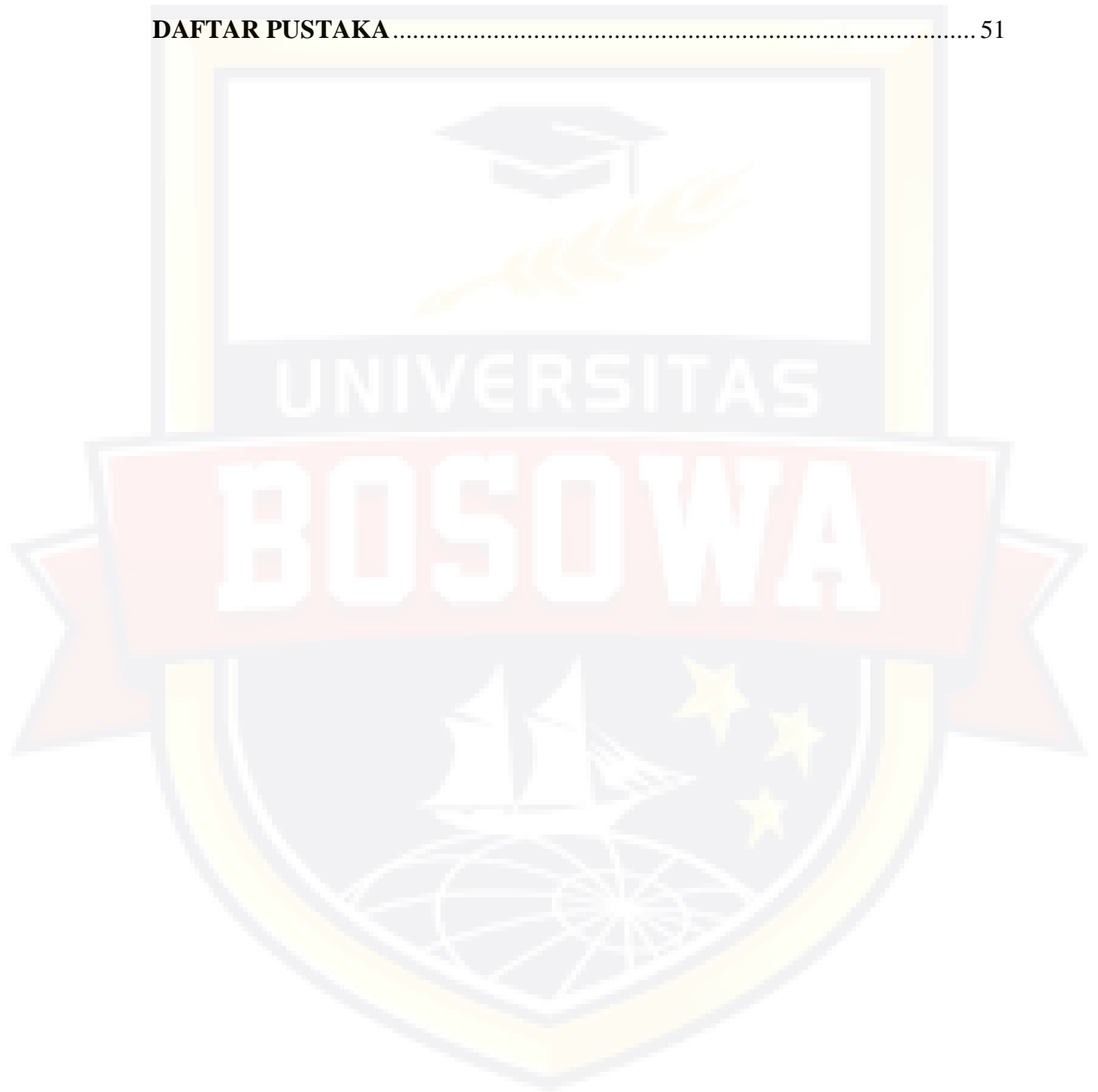


9. Saudara sekaligus sahabat sedari SMA, yaitu Zahra Wahyuni, Ananda Salsabilah Ramadhani, Anniken Rahmah Dewi, dan Suciarni Rahmadani yang tiada henti membantu dalam keadaan apapun, mendukung, dan menemani penulis dalam suka maupun duka.
10. Teman-teman IRON BURN 2019 yang telah bersama-sama menyelesaikan studi, yaitu Ummairah, Andini Guswari, Vivi Nurmalasari, Adelia Juliarti, Anggun Lestari, Mutia Astar, Nur Magfira, Waode Ma'rifatul Yusnan, Julia Liwun, Fachriza Azzahra, dan Yun Silva Buk kang.
11. Teman-teman seperjuangan HI angkatan 2019, yaitu Andi Rochpikaramadhan, Firman Hasyim, Darni, Bobby Indrajaya, Iis Kurnia, Siana, Adinda Puja Lestari, Shinta Pratiwi, dan Zahra Anindi.
12. Member GFRIEND, yakni Kim Sojung, Jung Yerin, Jung Eunbi, Choi Yuna, Hwang Eunbi, dan Kim Yewon yang telah memberikan inspirasi dan kebahagiaan melalui karya musiknya selama perkuliahan.

## DAFTAR ISI

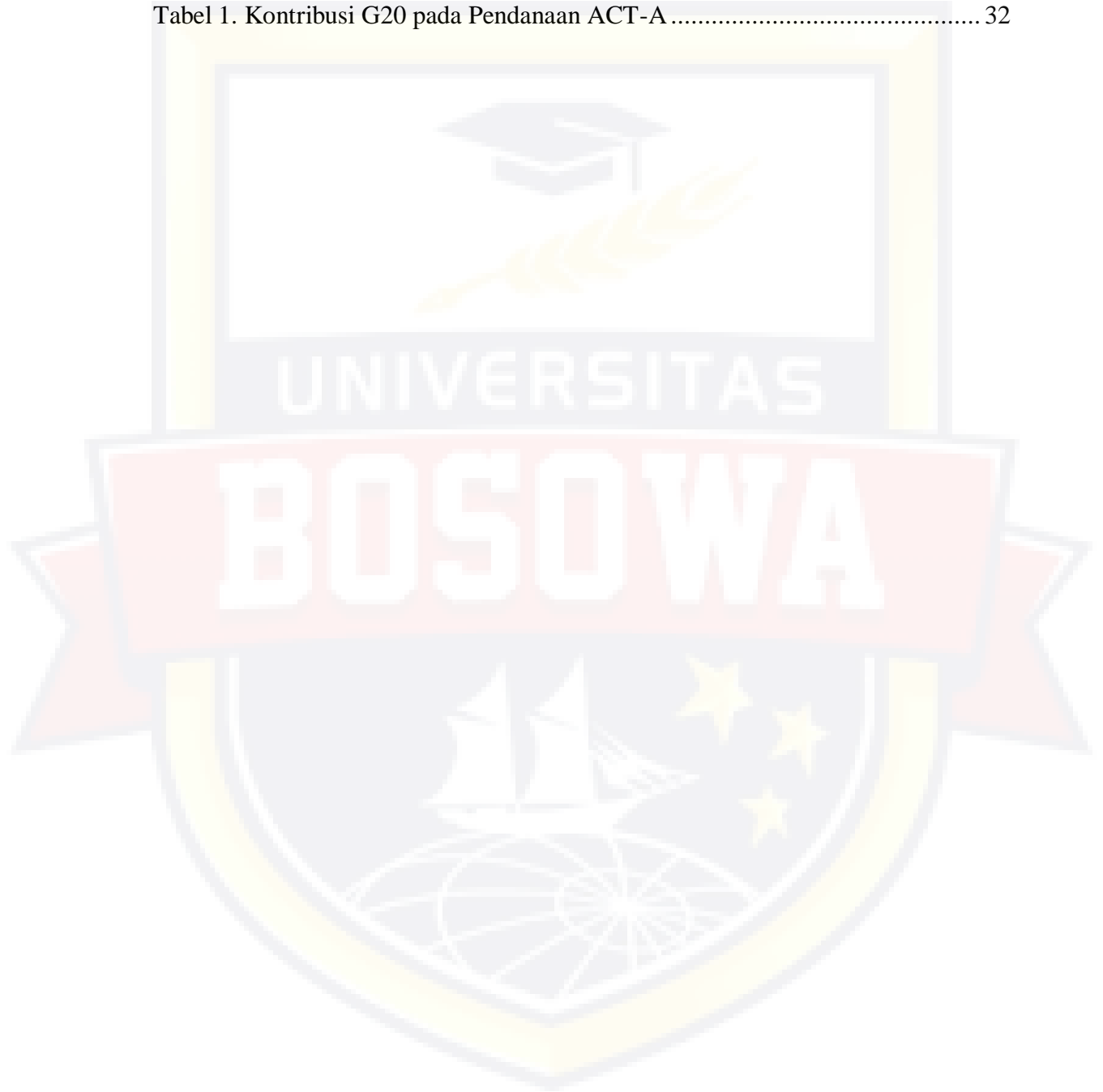
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Konsep .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Rancangan Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Covid-19 dan Dampaknya pada Dunia Internasional .....	11
B. Forum G20 dalam Praktik Hubungan Internasional .....	13
C. Multilateralisme dalam Perspektif Hubungan Internasional .....	18
D. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b> .....	25
A. Rencana Aksi G20 .....	25
B. Respon Kesehatan dalam Rencana Aksi G20 .....	26
C. Pemulihan Ekonomi dalam Rencana Aksi G20 .....	28
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	30
A. <i>Indivisibility</i> terhadap Respon Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi dalam Rencana Aksi G20 .....	30
B. <i>Diffuse Reciprocity</i> terhadap Respon Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi dalam Rencana Aksi G20 .....	43

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	48
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	51



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kontribusi G20 pada Pendanaan ACT-A.....	32
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemunculan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang pertama kali diidentifikasi dari wabah di Wuhan, China pada Desember 2019, telah menciptakan situasi darurat kesehatan yang menjalar ke ratusan negara lintas benua (OECD, 2020). Virus Covid-19 telah menjakiti lebih dari 800 ribu orang dan 40 ribu kasus kematian di 213 negara dan dua kawasan per 31 Maret 2020. Amerika Serikat menjadi negara dengan 160 ribu kasus Covid-19 tertinggi dan 105 ribu di Italia. Italia menjadi negara dengan 12 ribu kasus kematian terbanyak pada Maret 2020 (World Health Organization, 2020a).

Menanggapi kasus penularan yang hampir menyentuh satu juta kasus tersebut, negara-negara memberlakukan pembatasan sosial ketat (*lockdown*) untuk mengurangi tingkat penularan virus pada awal April 2020. Tetapi, hal ini masih belum dapat menekan laju penularan virus. Kasus Covid-19 kian memarah setiap bulannya di berbagai negara. Pada akhir Agustus 2020, Amerika Serikat menghadapi 5,8 juta kasus infeksi tertinggi di dunia, kemudian disusul oleh Brasil dengan 4 juta kasus. Pada negara berkembang, India menghadapi 3,6 juta kasus yang merupakan angka infeksi tertinggi di Asia, sementara Indonesia dengan 170 ribu kasus yang merupakan terbanyak di Asia Tenggara (World Health Organization, 2020c).

Pada saat yang sama, pembatasan sosial ini justru berbenturan dengan ekonomi global yang mengakibatkan negara-negara masuk ke dalam resesi ekonomi. Amerika Serikat menghadapi lonjakan pengangguran yang tinggi akibat pandemi yang sebelumnya dari 4,4% di bulan Maret menjadi 14,7% di bulan April 2020. Jumlah pengangguran naik dari 15,9 juta menjadi 23,1 juta di bulan April (Bureau of Labor Statistics, 2020). Di Brazil, penguncian dan pemberian bantuan berkontribusi pada penurunan tingkat partisipasi pada kuartal Juli-September 2020 menyebabkan 13,7 juta orang mengundurkan diri dari pasar tenaga kerja (Unidas, 2021).

Ekonomi global yang berkontraksi akibat pandemi Covid-19 tersebut menyebabkan sebagian besar negara-negara rentan (negara berpenghasilan rendah dan menengah) terutama di Afrika dan negara pulau kecil menjadi sangat rentan terhadap dampak langsung dan tidak langsung dari pandemi Covid-19 seperti tekanan sosial, kerawanan pangan akut, meningkatnya ketidaksetaraan, dan kemunduran pembangunan yang parah. Dalam hal ini, negara-negara tersebut memerlukan penanganan segera untuk mencegah dampak pandemi mengancam struktur sosial-ekonomi dan sistem kesehatan. Tetapi, adanya keterbatasan ruang fiskal negara berpenghasilan rendah dan menengah ini menjadikan pemulihan cukup sulit dilakukan untuk dapat mengatasi tantangan kesehatan dan ekonomi yang terjadi di negara tersebut (G20 Riyadh Summit, 2020a). Besarnya dampak krisis Covid-19 memerlukan tanggapan yang terkoordinasi dan terarah untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Urgensi kesehatan, sosial, dan ekonomi ini membutuhkan tindakan segera dan substansial untuk mendukung pemulihan negara-negara. Sehingga, hal ini kemudian mendorong kerja sama multilateral sebagai langkah yang tepat untuk bersama-sama menekan kerusakan jangka panjang dan mengendalikan penularan virus Covid-19.

G20 sebagai forum multilateral yang mewakili 80% perekonomian dunia mengambil tindakan kolektif untuk memandu negara-negara dalam mengatasi masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi. Melalui KTT Luar Biasa pada Maret 2020, G20 berkomitmen untuk berupaya memberikan bantuan kepada semua negara yang membutuhkan bantuan untuk memperkuat pembangunan kapasitas dan bantuan teknis dalam menghadapi pandemi serta siap memobilisasi dukungan pembangunan dan kemanusiaan (G20 Riyadh Summit, 2020b).

G20 menunjukkan respon dan konsesusnya dalam respon kolektif yang tertuang dalam Rencana Aksi G20 (*G20 Action Plan in Response to Covid-19 Pandemic*) yang terdiri atas komitmen-komitmen dari koordinasi kebijakan negara anggota serta koordinasi dengan jaringan global yang meliputi interaksi antara institusi internasional yaitu IMF, WTO, WHO, dan Bank Dunia, serta organisasi regional. Respon kolektif ini bertujuan untuk melindungi kesehatan, pekerjaan, dan pendapatan masyarakat; menjaga stabilitas keuangan dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi; meminimalkan gangguan pada rantai pasokan global; serta memberikan bantuan kepada negara yang rentan dalam

merespon dampak pandemi (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kerja sama multilateral G20 dalam mendukung upaya pemulihan negara-negara yang rentan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Penelitian ini memberikan batasan masalah pada:

- a) Dukungan pemulihan G20 kepada negara-negara rentan dimaksudkan pada aspek respon kesehatan dan pemulihan ekonomi.
- b) Komitmen dari Rencana Aksi G20 (*G20 Action Plan in Response to Covid-19 Pandemic*) menjadi landasan dukungan pemulihan G20 kepada negara-negara rentan.
- c) Penelitian ini menekankan pada upaya G20 dalam implementasi beberapa program spesifik respon kesehatan dan pemulihan ekonomi negara-negara rentan melalui Rencana Aksi G20.
- d) Durasi penelitian pada tahun 2020-2022 yang mengacu pada Rencana Aksi G20 yang mulai berjalan pada tahun 2020.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini merumuskan permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimanakah upaya multilateral G20 dalam mendukung respon kesehatan



dan pemulihan ekonomi negara-negara rentan terhadap pandemi Covid-19 melalui Rencana Aksi G20?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya multilateral G20 dalam mendukung respon kesehatan dan pemulihan ekonomi negara-negara rentan di masa pandemi Covid-19 melalui implementasi komitmen Rencana Aksi G20.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a) Kegunaan akademis**

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu studi hubungan internasional dalam penelusuran kerja sama G20 sebagai arena internasional dalam menyokong pemulihan negara-negara yang rentan terhadap pandemi Covid-19.

##### **b) Kegunaan praktis**

Penelitian ini menunjukkan kemampuan multilateral G20 dalam mendukung respon kesehatan dan pemulihan ekonomi negara-negara rentan yang berimplikasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan secara tidak langsung berdampak pada masyarakat.

##### **c) Kegunaan tambahan**

Penelitian ini bertujuan sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Bosowa.

#### D. Kerangka Konsep

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang merupakan fokus dari penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori multilateralisme untuk membedah kerja sama internasional G20 dalam hal Rencana Aksi G20 untuk mendukung respon kesehatan dan pemulihan ekonomi negara-negara rentan.

Dalam definisinya, multilateralisme menurut Keohane dalam *'Multilateralism: An Agenda for Research'* didefinisikan sebagai praktik koordinasi kebijakan nasional oleh tiga negara atau lebih, melalui pengaturan ad hoc atau melalui institusi. Secara umum, institusi tersebut merupakan suatu set aturan yang tetap dan terhubung secara formal dan informal yang menentukan peran perilaku, membatasi aktivitas, dan membentuk ekspektasi. Sederhananya bahwa multilateral adalah kata sifat yang memodifikasi kata benda institusi. Dengan demikian, multilateralisme menggambarkan bentuk kelembagaan generik dalam hubungan internasional (Keohane, 1990).

Sementara itu dalam buku yang berjudul *'Multilateralism: The Anatomy of an Institution'*, John Gerard Ruggie menjelaskan multilateralisme adalah institusi yang menerapkan perilaku umum (*generalized principles of conduct*) dengan aturan yang menentukan perilaku negara anggota sesuai dalam situasi tertentu tanpa memperhatikan kepentingan partikularistik yang mungkin ada. Kemudian, dalam membentuk sebuah tatanan multilateralisme, Ruggie memaparkan dua prinsip normatif multilateralisme (Ruggie, 1992). Prinsip pertama adalah ketidakterpisahan (*indivisibility*), dimana Ruggie mengilustrasikan prinsip perilaku yang digeneralisasi secara logis akan

mensyaratkan adanya ketidakterpisahan (*indivisibility*) di antara anggota kolektivitas. Hal ini digambarkan ketika masalah yang menimpa satu negara akan menyebabkan konsekuensi bagi rekan-rekannya. Selain itu, ketidakterpisahan kepentingan ini juga merujuk pada norma *Most Favoured Nations* (MFN), bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap negara-negara anggota.

Kesamaan prinsip negara anggota G20 dalam menindaklanjuti dampak pandemi Covid-19 menjadikannya sebagai agenda prioritas KTT G20. Negara anggota berkomitmen untuk menggunakan semua alat kebijakan yang mendukung ekonomi global, menjaga stabilitas keuangan, dan mencegah dampak ekonomi yang mendalam dan berkepanjangan. Melalui Rencana Aksi G20, negara anggota menetapkan prinsip-prinsip utama yang memandu tindakan pemulihan ekonomi serta komitmen terhadap tindakan spesifik yang mendorong kerja sama ekonomi internasional (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, 2020).

Selain itu, menurut C.P. Kindleberger, ketidakterpisahan dalam multilateralisme juga berada dalam istilah barang publik global (*global public goods*) yang merupakan barang internasional yang bermanfaat bagi semua orang tanpa terkecuali (Charles P. Kindleberger, 1986). Dalam Rencana Aksi G20, negara anggota menggiatkan vaksinasi Covid-19 sebagai barang publik global tentang kesehatan dalam mencegah, menahan, dan menghentikan penularan berdasarkan kolaborasi multisektor di dalam negeri dan internasional.

Prinsip normatif kedua adalah prinsip timbal balik yang menyebar atau manfaat yang setara (*diffuse reciprocity*). Prinsip *indivisibility* yang terdapat dalam multilateralisme harus mensyaratkan adanya *diffuse reciprocity* di mana biaya dan manfaat tersebar di antara negara anggota. Negara anggota tentunya mengharapkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang (Keohane, 1990). Negara-negara maju yang saling mengoordinasikan kebijakannya tampaknya memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan kebijakan dalam forum dan negara lainnya akan mengorbankan kepentingannya. Akan tetapi, timbal balik menyebar ini mengisyaratkan bahwa keuntungan akan diterima oleh semua negara anggota, meskipun beberapa negara akan mendapatkannya dalam jangka waktu yang lama.

Dengan demikian, kerangka konseptual multilateralisme oleh Ruggie (1992) ini dipergunakan untuk analisis upaya multilateral G20 dalam mendukung respon kesehatan dan pemulihan ekonomi negara-negara rentan terhadap pandemi Covid-19 melalui Rencana Aksi G20.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjabarkan upaya multilateral G20 dalam mendukung respon kesehatan dan pemulihan ekonomi negara-negara rentan terhadap pandemi Covid-19 melalui Rencana Aksi G20.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data penelitian yang akan digunakan adalah data sekunder. Data-data sekunder bersumber dari dokumen resmi seperti dokumen Rencana Aksi G20, *website* pemerintah, jurnal, berita, dan buku-buku terkait topik penelitian ini. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan kerangka konseptual agar menghasilkan suatu makna baru dari data-data yang telah dikumpulkan.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data akan dilakukan melalui studi pustaka secara digital. Penelaahan dilakukan pada data sekunder seperti buku-buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal, serta *website-website* yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Data-data sekunder tersebut akan disesuaikan dengan topik penelitian agar dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian ini.

## **4. Teknik Analisis Data**

Agar dapat menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Agar bersifat sistematis, peneliti akan menggunakan tiga tahapan penelitian kualitatif menurut Creswell, yaitu pengumpulan data, analisis data, serta pemaknaan atau interpretasi data (Creswell, 2014).

## **F. Rancangan Sistematika Penulisan**

### **Bab I**

Pada Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian dan masalah yang diangkat oleh peneliti. Permasalahan yang muncul tentunya akan dibatasi dan dirumuskan menjadi sebuah pertanyaan penelitian. Bab ini juga mencakup manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual sebagai dasar analisis, metode penelitian untuk penjelasan sumber dan penyusunan penelitian, serta rancangan sistematika penulisan. Bab ini ditutup dengan penelitian terdahulu.

### **Bab II**

Bab II berfokus pada penjelasan terkait tinjauan pustaka variable-variabel dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

### **Bab III**

Bab III akan memberikan gambaran umum mengenai Rencana Aksi G20 serta respon kesehatan dan pemulihan ekonomi dalam Rencana Aksi G20.

### **Bab IV**

Bab IV akan memaparkan hasil analisis dan pembahasan mengenai upaya multilateral G20 dalam implementasi respon kesehatan dan pemulihan ekonomi melalui Rencana Aksi G20.

### **Bab V**

Bab V berisikan kesimpulan dari analisis data dan konsep yang digunakan serta jawaban atas perumusan masalah yang merupakan pertanyaan penelitian ini. Bab ini juga akan memuat saran penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Covid-19 dan Dampaknya pada Dunia Internasional**

Pasca seratus hari kasus Covid-19 pertama kali diumumkan oleh WHO pada 13 April 2020, lebih dari 1,7 juta orang yang terinfeksi dan 85 ribu kasus kematian (World Health Organization, 2020b). Penyebaran virus secara global telah membuat sistem kesehatan menjadi rentan serta menyebabkan gangguan sosial dan ekonomi yang meluas. Pertumbuhan global diproyeksikan turun -4,9 persen pada laporan *World Economic Outlook 2020* (WEO) oleh IMF. Covid-19 berdampak hebat pada aktivitas di paruh pertama tahun 2020 yang kemudian membutuhkan pemulihan bertahap dengan proyeksi pertumbuhan global dapat tumbuh mencapai 5,4 persen pada tahun 2021 (IMF, 2020).

Keruntuhan ekonomi oleh Covid-19 berakibat lebih parah dari yang diantisipasi pada April 2020. Data ekonomi yang diproyeksikan dalam WEO April 2020 menunjukkan penurunan aktivitas global dengan penurunan yang lebih parah dari yang diproyeksikan sebelumnya untuk beberapa negara. Merujuk pada perilisan WEO April 2020 tersebut, pandemi meningkat dengan cepat di sejumlah negara ekonomi berkembang yang mengharuskan penguncian ketat dan menghadapi tantangan tambahan termasuk pembalikan arus modal akibat risiko global menurun, tekanan mata uang, serta sistem kesehatan yang lebih lemah dan ruang fiskal yang lebih sedikit untuk memberikan dukungan.

Selain itu, beberapa ekonomi memasuki krisis dengan pertumbuhan yang lamban dan tingkat utang yang tinggi (IMF, 2020).

Di negara berpenghasilan rendah, dampak sosial-ekonomi kian memarah seiring tingginya tingkat penularan Covid-19. Diversifikasi ekspor yang terbatas telah meningkatkan kerentanan negara-negara berpenghasilan rendah terhadap perdagangan global. Situasi ini turut berdampak pada sektor pariwisata internasional dan menyebabkan turunnya lapangan pekerjaan di banyak negara berpenghasilan rendah. Permintaan ekspor yang tidak stabil dan jatuhnya harga komoditas seperti minyak dan gas telah mengakibatkan masalah neraca pembayaran dan dampak buruk lainnya. Di saat yang sama, situasi keuangan di negara-negara berpenghasilan rendah semakin diperburuk akibat jatuhnya investasi asing langsung dan pengiriman uang, serta hampir setengah dari negara-negara ini berisiko tinggi pada utang yang melampaui tinggi. Ruang fiskal yang terbatas membuat respon fiskal terhadap pandemi menjadi tidak memadai (United Nations, 2021).

Pertumbuhan ekonomi di kawasan Afrika Sub-Sahara diperkirakan melambat dari 4,1% pada 2021 menjadi 3,3% pada 2022 dibandingkan dengan negara maju yang diperkirakan akan kembali ke tren pertumbuhan pra-pandemi pada 2022. Hambatan pertumbuhan berada pada rendahnya angka vaksinasi, tingkat inflasi dua digit di 17 negara, meroketnya harga komoditas, kerawanan pangan, dan kendala rantai pasokan yang dipicu oleh perang di Ukraina merupakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan ini (World Bank, 2022a).



Sifat penurunan yang tersinkronisasi telah memperburuk gangguan domestik di seluruh dunia. Perdagangan turun hampir -3,5 persen tahun ke tahun di kuartal pertama dikarenakan permintaan yang lemah, jatuhnya pariwisata lintas batas, dan gangguan pasokan yang disebabkan oleh *close borders* (IMF, 2020).

Berbagai dampak Covid-19 menimbulkan banyaknya penurunan pada aktivitas global, seperti menurunnya perdagangan, volatilitas mata uang dan pasar keuangan, masalah distribusi logistik (perbekalan kesehatan, pangan, dan lain-lain), meningkatnya pengangguran akibat hilangnya pekerjaan, tekanan resesi global, dan ketidakstabilan ekonomi. Ketidaksiapan negara semakin memperparah kesulitannya dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19. Selain itu, beberapa kelompok demografi rentan dirugikan, seperti lansia, masyarakat miskin, etnis tertentu, hingga aspek gender (OECD, 2021).

## **B. Forum G20 dalam Praktik Hubungan Internasional**

Pada dasarnya, Kelompok Dua Puluh (*Group of Twenty*) atau G20 adalah forum internasional yang bekerja dalam ranah ekonomi pada isu-isu utama agenda ekonomi dan keuangan global. G20 terdiri atas 19 negara, yakni Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat, serta satu lembaga internasional yaitu Uni Eropa (UE). Forum ini mewakili sekitar dua pertiga populasi dunia, 85 persen

produk domestik bruto global, dan lebih dari 75 persen perdagangan global (Sherpa G20 Indonesia, 2022).

G20 diluncurkan pada tahun 1999 oleh negara-negara Kelompok Tujuh (G7). G7 terdiri atas tujuh negara ekonomi maju yang kemudian meminta negara-negara ekonomi berkembang untuk bergabung dan bersama-sama mengatasi tantangan terhadap stabilitas keuangan internasional yang ditimbulkan oleh serangkaian krisis keuangan yang berpusat di Amerika Latin dan Asia. Pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 menjadi sinyal bahwa pemerintah G7 maupun lembaga internasional seperti IMF tidak mampu memberikan respon koordinasi global terhadap krisis ekonomi dan keuangan yang berkembang pesat. Sehingga, G20 dianggap sebagai forum yang tepat karena mencakup ekonomi utama, baik dari negara maju maupun negara berkembang. Peran dan profil politik G20 meningkat saat pertemuan puncak reguler kepala negara atau pemerintahan anggotanya pada KTT 2008 (Szczepański & Bassot, 2015). Puncak dari KTT G20 adalah sebuah komunikasi yang menghasilkan komitmen dan visi para anggota untuk masa depan, disusun dari rekomendasi yang dipilih dan hasil dari pertemuan tingkat menteri dan aliran kerja lainnya. Hingga saat ini, KTT G20 telah diselenggarakan sebanyak 15 kali. Selain itu, IMF *Managing Director* dan Presiden Bank Dunia bersama Ketua IMFC (*International Monetary and Financial Committee*) dan *Development Committee* mengikuti pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Pusat Bank secara *ex officio*.

Secara kelembagaan, G20 tidak memiliki sekretariat permanen. Proses dan sistem kerja G20 dilakukan melalui Presidensi yang ditentukan secara konsensus oleh negara anggota berdasarkan rotasi regional dan pergantian setiap tahun. Oleh karena itu, dalam hal mengoptimalkan kinerja G20, setiap tahun terdapat “Troika” yang terdiri dari kepresidenan sebelumnya, kepresidenan tahun ini, dan kepresidenan yang akan datang – yang mana melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif untuk memastikan kelangsungan agenda G20 (Sherpa G20 Indonesia, 2022). Dalam persiapan menuju KTT, pertemuan G20 dilaksanakan melalui dua arus, yakni jalur keuangan (*finance track*) yang memprioritaskan isu-isu ekonomi oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral, serta jalur Sherpa (*sherpa track*) yang membahas isu-isu non-keuangan. Kedua jalur pertemuan ini menyatukan kelompok kerja dan gugus tugas yang melaksanakan pekerjaan teknis di bidang kebijakan yang dicakup oleh KTT. Selain itu, terdapat lima kelompok keterlibatan yang diakui untuk memberikan rekomendasi dan menginformasikan keputusan G20, yakni pemimpin bisnis, masyarakat sipil, buruh terorganisir, lembaga pemikir dan akademisi, serta pemimpin muda. G20 juga didukung oleh organisasi internasional seperti Dewan Stabilitas Keuangan (FSB), Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang memberikan saran untuk mengidentifikasi bidang prioritas dan kebijakan yang memiliki dampak terbesar (G20 Russia Presidency, 2013).

G20 merumuskan tujuannya dengan lebih jelas pada KTT di Pittsburgh, Amerika Serikat tahun 2009 ialah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. G20 menitikberatkan pada upaya reformasi sistem keuangan global sebagai salah satu kunci dalam merespon krisis ekonomi global (Sherpa G20 Indonesia, 2022). G20 menyetujui untuk mengoordinasikan kebijakan dan menghasilkan kesepakatan politik dalam mengatasi tantangan ekonomi global.

Pada proses pembentukan para pemimpin di Washington, DC tahun 2008, G20 bekerja untuk memastikan Lembaga Keuangan Internasional (IFI) dapat memberikan dukungan penting bagi ekonomi global. Hal ini kemudian semakin disoroti pada KTT London 2009, dengan para pemimpin menyebutkan bahwa G20 dimulai dengan kemakmuran yang tidak terpisahkan sehingga menghasilkan pertumbuhan yang terus dipertahankan dan harus dibagi, serta rencana pemulihan global harus mengutamakan kebutuhan dan pekerjaan keluarga pekerja keras, tidak hanya di negara maju tetapi juga di pasar negara berkembang dan negara termiskin di dunia. Pada KTT London 2009, mobilisasi USD 50 miliar dilakukan untuk mendukung perlindungan sosial, meningkatkan perdagangan, dan melindungi pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah (Davies, 2015).

Dalam komitmennya pada *G20 5th Anniversary Vision Statement*, G20 akan turut mempertimbangkan kepentingan lembaga internasional dan negara yang tidak termasuk dalam G20 dikarenakan dampak komitmennya dapat menjangkau jauh dan memengaruhi negara-negara di semua tahap

perkembangan. Setiap pemimpin G20 memiliki strategi penjangkauan sendiri yang melibatkan dialog dengan lembaga dan forum internasional maupun regional serta mengundang beberapa negara non-anggota pada KTT. Penjangkauan ini berupaya meningkatkan pemahaman internasional tentang G20, meningkatkan transparansi eksternal, dan memberikan pandangan dan masukan untuk pertemuan puncak (G20 Russia Presidency, 2013).

Melalui KTT 2016, G20 mendobrak jalan baru untuk pertumbuhan dengan menjaga momentum pemulihan perekonomian global (*short term*) dan mengangkat potensi pertumbuhan dalam inovasi, revolusi industri baru, dan ekonomi digital (*mid-long term*) (G20 Summit 2016, 2015). Selain itu pada KTT 2020, G20 mendukung pemulihan ekonomi global termasuk fasilitas perdagangan (*short and long-term*) yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Pada faktanya, fenomena pandemi Covid-19 telah menyebabkan negara-negara di dunia termasuk negara G20 menghadapi situasi krisis yang hampir sama. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa negara-negara G20 memiliki andil terbesar dalam resesi ekonomi dunia akibat pandemi, mengingat negara-negara G20 merupakan sekitar 60 persen dari luas daratan dunia, 66,7 persen dari populasi dunia, dan lebih dari persen PDB (Lin et al., 2018). Kompleksitas sistem ekonomi negara-negara G20 memberikan dukungan terhadap keputusan kebijakan yang menghasilkan berbagai komitmen-komitmen, khususnya ketika menghadapi krisis ekonomi seperti pandemi Covid-19.

Isu Covid-19 mulai ditekankan pada Presidensi G20 Arab Saudi 2020 terkait kesiapsiagaan, pencegahan, deteksi, dan respon pandemi global (*Global*

*pandemic preparedness, prevention, detection, and response*). Presidensi Italia 2021 mendorong perluasan imunisasi Covid-19 dan membahas beberapa rencana kerjasama kesehatan internasional, terutama pada hubungan antara kesehatan pendanaan. Serta Presidensi Indonesia 2022 membahas penguatan arsitektur kesehatan global dan transformasi digital dalam menghadapi fase transisi pandemi menuju fase endemi.

Kemajuan dari setiap komitmen-komitmen terus dilaporkan dalam hal untuk memastikan pemulihan yang tepat. Kredibilitas pemenuhan janji dan komitmen dari masing-masing negara yang terlibat, menunjukkan bahwa posisi negara tersebut merupakan respon positif terhadap dinamika masa depan dengan mendorong mekanisme negosiasi antar negara. Hal ini menunjukkan adanya bauran timbal balik yang menjelaskan komitmen yang dibuat oleh banyak negara dan akan dilaksanakan melalui review dan komitmen bersama.

### **C. Multilateralisme dalam Perspektif Hubungan Internasional**

Dalam kerangka hubungan internasional, kerja sama yang dilakukan antara tiga negara atau lebih disebut sebagai kerja sama multilateralisme. Pada dasarnya, kerja sama multilateralisme mengharuskan negara-negara untuk berkoordinasi dan menemukan solusi kooperatif untuk masalah bersama. Pada beberapa contohnya adalah perubahan iklim yang menurut definisi tidak menghormati batas-batas nasional atau negara-negara yang menghadapi masalah epidemi global yang dapat menyebar ke luar lintas batas negara. Hal ini

kemudian menunjuk pada perlunya kerja sama multilateralisme dalam mengatasi berbagai masalah bersama demi kepentingan nasional masing-masing negara.

Dalam sejarahnya, multilateralisme didefinisikan dalam dua cara yang berbeda. Menurut Keohane dalam bukunya berjudul *“Multilateralism: An Agenda for Research”*, multilateralisme didefinisikan sebagai praktik koordinasi kebijakan yang menciptakan tindakan kolektif melalui lembaga oleh seperangkat negara merdeka yang ditentukan secara inklusif. Pada umumnya, organisasi multilateral terbuka untuk semua negara yang memenuhi kriteria tertentu. Aturan organisasi multilateral diketahui publik dan bertahan selama periode waktu yang substansial. Definisi ini mendefinisikan multilateralisme secara institusional (Keohane, 1990).

Sementara itu, definisi multilateralisme menurut John Gerard Ruggie dalam bukunya *“Multilateralism: The Anatomy of an Institution”*, ia membatasi multilateralisme pada tindakan di antara tiga atau lebih negara berdasarkan *“generalized principles of conduct”* atau prinsip-prinsip perilaku yang digeneralisasikan, yakni prinsip-prinsip yang menentukan perilaku yang tepat untuk suatu kelompok tindakan, tanpa memperhatikan kepentingan partikularistik dari pihak atau urgensi strategis yang mungkin ada dalam setiap fenomena tertentu (Ruggie, 1992).

Definisi Ruggie ini dianggap penting dalam mempelajari kemungkinan transformasi dalam politik dunia. Kebanyakan multilateralisme disertai dengan diskriminasi antarnegara, menurut kekuasaan, status, kekayaan, atau karakteristik lainnya. Tindakan menurut “prinsip perilaku umum” yang digagas

oleh Ruggie ini hampir tidak diketahui sebelum pertengahan abad ke-20. Seperti yang disebutkan oleh Fritz Scharpf (Scharpf, 1999), bentuk-bentuk multilateralisme dalam pengertian yang paling umum difasilitasi oleh institusi kedaulatan dan melalui Konser Eropa (Sistem Kongres pasca Kongres Wina), yang mana bentuk-bentuk multilateralisme tersebut mendiskriminasi negara-negara, terutama antara Kekuatan-Kekuatan Besar dengan negara-negara lainnya.

Terlepas dari aspek kuantitatif dasarnya, Gerard Ruggie menjelaskan prinsip-prinsip kualitatif yang merujuk pada definisinya tentang multilateralisme yang membentuk karakter tatanan atau kelembagaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah kepentingan yang tidak dapat dipisahkan di antara para peserta (*indivisibility*) dan komitmen untuk menyebarkan timbal balik (*diffuse reciprocity*) (Ruggie, 1992). Multilateralisme memiliki sejarah yang panjang, tetapi dalam prinsipnya dikaitkan dengan perkembangan multilateralisme di era setelah Perang Dunia II yang mana terjadi perkembangan perjanjian multilateral, terutama dipimpin oleh Amerika Serikat. Organisasi yang paling kuat mewujudkan prinsip multilateralisme dapat ditemukan dalam perdagangan (WTO) dan keamanan (Organisasi Perjanjian Atlantik Utara [NATO]).

Prinsip pertama adalah prinsip-prinsip pengorganisasian yang digeneralisasi secara logis mensyaratkan adanya ketidakterpisahan (*indivisibility*) di antara anggota kolektivitas sehubungan dengan rentang perilaku yang bersangkutan. Dalam contohnya pada rezim perdagangan multilateral yang berpusat pada *General Agreement on Tariffs and Trade*



(GATT) pada tahun 1948 menggunakan prinsip *most favoured nation* (MFN) yang mana setiap manfaat yang diterima oleh satu negara harus tersedia untuk semua negara peserta. Pihak ketiga diperlakukan dengan cara yang lebih inklusif dan diberikan perlakuan yang sama berdasarkan klausul MFN. Dengan demikian, sistem GATT menjamin non diskriminasi untuk semua pihak yang membuat kontrak. Peran dan fungsi GATT digantikan oleh Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) yang terbentuk pada 1 Januari 1995. Selain itu, dalam pengaturan keamanan, prinsip multilateralisme diwujudkan dalam sistem keamanan kolektif seperti NATO di mana perang melawan satu negara dianggap sebagai perang melawan semua negara. Hal ini kemudian memastikan bahwa setiap tindakan agresi terhadap anggota sistem kolektif mendapat tanggapan dari semua anggota (Ruggie, 1992).

Dalam kedua contoh tersebut, terdapat gagasan tentang ketidakterpisahan kepentingan (*indivisibility*). Dalam pengaturan keamanan, perdamaian diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan, sehingga tidak ada anggota yang berpartisipasi dalam perang sementara yang lain dalam keadaan damai. Dalam kebijakan perdagangan, norma MFN menjadikan sistem perdagangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, ketidakterpisahan adalah prinsip pertama dari multilateralisme.

Kedua, multilateralisme yang berhasil dalam praktiknya menggunakan prinsip di antara para anggotanya apa yang disebut Keohane sebagai timbal balik menyebar (*diffuse reciprocity*) (Keohane, 1986). Terkait dengan prinsip ketidakterpisahan kepentingan, multilateralisme dianggap menimbulkan

harapan timbal balik yang tersebar di antara para anggota. Koordinasi dan kerja sama ini harus melihat semua negara memiliki konstruksi yang sama dalam menerima hasil kesepakatan yang setara, dimana tidak ada perbedaan antara negara prioritas atau lebih penting. Berkaitan dengan hal tersebut, Ruggie menjelaskan bahwa manfaat timbal balik menyebar akan bersifat jangka panjang, meskipun kemungkinannya dalam jangka pendek belum menguntungkan (Ruggie, 1992).

Dalam situasi yang ditandai dengan timbal balik yang tersebar, terdapat harapan bahwa keseimbangan diharapkan atas rangkaian pertukaran yang berkelanjutan atau potensi yang tidak terbatas dengan sekelompok mitra. Misalnya, dalam sistem keamanan kolektif yang diuraikan sebelumnya, para anggota tidak mengharapkan kompensasi atas sumber daya militer yang dikeluarkan untuk membela negara anggota yang terancam. Tetapi, kompensasi terletak pada pengetahuan bahwa jika mereka diserang, mereka juga akan mendapat manfaat dari tanggapan kolektif terhadap serangan itu. Ketidakterpisahan kepentingan memunculkan harapan timbal balik yang tersebar dan inklusifitas yang lebih besar (James, 2022).

Selanjutnya, dalam menilai kondisi efektif sebuah multilateralisme, prasyarat lebih lanjut menyangkut legitimasi (domestik) negosiator dan kemampuan anggota untuk membuat komitmen yang mengikat atas negara yang diwakili, serta pengaturan organisasi untuk keberhasilan pelaksanaan komitmen yang dibuat. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, terdapat risiko diplomasi multilateral tidak dapat mencapai sesuatu yang positif dan bahkan dapat

merugikan. Risiko termasuk perjanjian yang terbukti tidak dapat dijalankan, seperti zona perlindungan PBB di bekas Yugoslavia pada awal 1990-an atau tidak relevan karena mengabaikan masalah sebenarnya seperti Perjanjian Munich tahun 1938 yang tidak melakukan apa pun untuk menghentikan persiapan perang Hitler. Perjanjian semacam itu berisiko merusak persepsi, reputasi, dan kredibilitas multilateralisme, dan berkontribusi pada erosi atau reinterpretasi yang merayap dari tatanan internasional yang mendasarinya (Maull, 2020).

Mengacu pada literature review di atas, peneliti memutuskan untuk menggunakan konsep multilateralisme oleh Ruggie sebagai pisau analisis dalam membantu menjawab rumusan masalah penelitian ini. Peneliti memilih konsep ini karena dianggap memiliki koherensi dalam memetakan upaya G20 dalam implementasi respon kolektif mendukung pemulihan negara-negara rentan terhadap dampak pandemi Covid-19. Pertama, konsep ini mengulas lebih dalam terkait koordinasi kebijakan internasional yang menggambarkan Rencana Aksi G20 yang kemudian dapat membantu peneliti melihat pola dan realitas respon pengendalian dampak Covid-19 oleh negara G20. Kedua, konsep ini memberikan dua indikator multilateralisme yang akan membantu peneliti untuk melihat upaya multilateral G20 dalam mendukung respon kesehatan dan pemulihan ekonomi negara-negara rentan terhadap pandemi Covid-19 melalui Rencana Aksi G20.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan menemukan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan temuan penelitian sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan diikuti dengan ringkasan. Berikut penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik kajian peneliti.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiwiek (2020) yang berjudul *Kerja Sama G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global dari Covid-19*. Studi ini mengkaji kinerja kelembagaan G20 dalam upaya pemulihan ekonomi global dari Covid-19. Untuk menjelaskan tata kelola G20, studi ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data berbasis internet, dan konsep model hub yang sistematis. Temuan studi ini menunjukkan bahwa G20 telah menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan sistem kerja sama melalui umpan balik. Koordinasi dan evaluasi berbagai kapasitas masing-masing anggota dilakukan untuk mengukur ketepatan langkah negara-negara anggota G20 (Astuti, 2020).

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Rencana Aksi G20**

Melalui KTT Riyadh 2020, G20 menetapkan prinsip dan komitmen utama kerja sama ekonomi internasional dengan mengambil upaya mendukung pemulihan dan mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif yang tertuang ke dalam Rencana Aksi G20. Rencana Aksi G20 merupakan langkah awal respon kolektif G20 terhadap pengendalian dampak pandemi Covid-19. Langkah tersebut berisikan prioritas kerja sama tentang komitmen-komitmen negara G20 untuk menguatkan sistem kesehatan, melindungi pekerjaan dan pendapatan masyarakat, mengembalikan pertumbuhan ekonomi global, dan memastikan ketahanan sistem keuangan merupakan komponen penting dari Rencana Aksi G20 (G20, 2020).

Bersama dengan organisasi internasional, G20 berkoordinasi dengan mendukung strategi IMF, Kelompok Bank Dunia (WBG) dan Lembaga Keuangan Internasional (IFI) lainnya untuk membantu negara-negara yang membutuhkan dengan menggunakan semua instrumen dan menegakkan stabilitas serta ketahanan keuangan global. Langkah-langkah keuangan dalam pemulihan ekonomi global tersebut, meliputi: pemberian dukungan IMF yang komprehensif, mengimplementasikan dukungan Grup Bank Dunia (WBG) dan bank-bank pembangunan multilateral, mengatasi kerentanan utang di negara-negara berpenghasilan rendah akibat pandemi, serta meningkatkan koordinasi

antarorganisasi internasional untuk memaksimalkan dampaknya dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, 2020). Forum G20 terus berkomitmen melakukan kerja sama internasional melalui prinsip-prinsip yang mengacu pada Rencana Aksi G20 untuk pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

Perbedaan negara G20 dalam menanggapi krisis dengan prospek kondisi ekonomi global yang berkembang, Rencana Aksi G20 diperbaharui dan dilaporkan kemajuannya secara umum. Hal ini untuk menindaklanjuti komitmen-komitmen negara anggota dalam mendukung pemulihan dan menentukan pengambilan langkah pemulihan yang tepat berikutnya. Seperti yang dijelaskan oleh Maull terkait keefektifan sebuah multilateralisme, komitmen G20 pada dasarnya tidak mengikat bagi negara anggota (Szczepański & Bassot, 2015). Tetapi, keberhasilan pelaksanaan komitmen juga berasal dari pengaturan organisasi yang mendukung penuh pemulihan bersama untuk keluar dari situasi krisis.

## **B. Respon Kesehatan dalam Rencana Aksi G20**

G20 Menteri Keuangan dan Kelompok Bank Sentral (*G20 Finance Minister and Central Bank Group Meeting*) yang selanjutnya disebut sebagai FMCBG, berkomitmen bahwa semua komponen respon kesehatan dipastikan dapat didanai sepenuhnya dalam mendukung penanganan dan mengurangi tingkat penularan infeksi, serta mencegah gelombang infeksi berulang.

Pendanaan dan kolaborasi diperlukan untuk mempercepat penelitian dan pengembangan diagnosis, terapi, dan vaksin. Sehingga, FMCBG bekerja sama dengan Menteri Kesehatan G20 dan Menteri Perdagangan dan Investasi untuk memastikan ketersediaan pasokan medis dan obat-obatan. Dalam Rencana Aksi G20, G20 menunjukkan pernyataan resmi terkait komitmen-komitmen negara anggota dalam merespon dampak kesehatan Covid-19, sebagaimana berikut:

1. G20 berkomitmen mendukung upaya kolektif dalam memastikan respon kesehatan terhadap SARS-CoV-2 dan variannya akan efektif, cepat, dan merata. Hal ini merujuk pada upaya mempercepat penelitian, pengembangan, produksi, dan distribusi diagnostik, terapi, dan vaksin Covid-19, termasuk melalui *Access to Covid-19 Tools-Accelerator* (ACT-A) dan Fasilitas COVAX yang memerlukan dukungan para pemangku kepentingan untuk menutupi kesenjangan pembiayaan.
2. G20 mengakui pembentukan *Multilateral Leaders Taskforce* (MLT) yang mempercepat akses ke vaksin, terapi, dan diagnostik untuk negara berkembang dengan memanfaatkan keuangan multilateral dan solusi perdagangan dan mengatasi hambatan operasional untuk pengiriman dan administrasi vaksin ke negara berpenghasilan rendah dan menengah. MLT didirikan oleh IMF, Bank Dunia, WHO, dan WTO.
3. G20 menekankan pada upaya peningkatan kerja sama dan koherensi kebijakan di antara organisasi multilateral, terutama WHO dan IFI untuk mengatasi krisis kesehatan dan membiayai pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon (*prevention, preparedness, and response*) terhadap pandemi di masa

akan datang secara berkelanjutan. G20 meminta kepada pihak swasta untuk dapat memainkan peran pelengkap untuk tindakan publik dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi.

### **C. Pemulihan Ekonomi dalam Rencana Aksi G20**

Kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19 membutuhkan respon pemulihan yang tanggap dan substansial dengan memastikan bahwa Covid-19 tidak menyebabkan kerusakan jangka panjang pada ekonomi domestik maupun ekonomi global yang lebih luas. Menanggapi hal tersebut, G20 mengambil upaya yang menyediakan jembatan bagi rumah tangga dan bisnis, meminimalkan kerusakan ekonomi dan sosial, memulihkan pertumbuhan ekonomi global, mempertahankan stabilitas pasar, dan memperkuat ketahanan dengan mendukung pekerjaan dan pendapatan rumah tangga.

Pemulihan ekonomi global tentunya perlu didukung oleh ketersediaan vaksin untuk mengendalikan penularan virus dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Tetapi, laju pemulihan bisa saja berbeda antarnegara seperti negara yang tetap terpapar pada risiko penurunan akibat penyebaran virus Covid-19 varian baru, distribusi vaksin yang tidak merata, kecepatan vaksinasi yang berbeda, dan kemacetan di sisi pasokan.

Oleh karenanya, G20 melalui Rencana Aksi G20 berupaya untuk mendukung negara-negara rentan dalam menghadapi dampak pandemi melalui skema penanguhan layanan utang di negara-negara berpenghasilan rendah. Komitmen tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Rencana Aksi, bahwa:



1. G20 mendorong tindakan cepat dan tegas untuk membantu negara-negara yang membutuhkan dalam penerapan *Debt Service Suspension Initiative* (DSSI).

Negara-negara yang memenuhi syarat DSSI mencakup semua negara *International Development Association* (IDA) dan semua negara kurang berkembang (sebagaimana didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang tengah memiliki utang kepada IMF dan Bank Dunia. Hal ini menunjukkan ada 72 negara peminjam IDA aktif ditambah Angola atau 73 negara yang memenuhi syarat prakarsa penangguhan layanan utang (DSSI) (World Bank, 2021).

Keringan utang yang diperoleh negara melalui DSSI harus berkomitmen untuk menggunakan sumber daya yang dibebaskan untuk meningkatkan pembiayaan pada perbaikan sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai respon terhadap krisis pandemi Covid-19.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. *Indivisibility* terhadap Respon Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi dalam Rencana Aksi G20**

Komitmen-komitmen G20 yang dibuat merupakan upaya negara G20 dan lembaga internasional dalam menghadapi risiko kerentanan kesehatan dan keruntuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 melalui koordinasi kebijakan. Hal ini didasari oleh kepentingan nasional negara G20 yang sama dan sebagai forum yang mewakili 80 persen perekonomian dunia mengambil tindakan sigap dalam membantu upaya pengendalian laju penularan infeksi dan perbaikan dampak ekonomi untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kepentingan nasional yang sama ini kemudian melahirkan ketidakterpisahan kepentingan (*indivisibility*) dalam lingkup multilateralisme G20.

Merebaknya kasus infeksi Covid-19 secara global memunculkan momentum untuk saling mengkoordinasikan kebijakan antarnegara G20 dalam mengatasi krisis terhadap sistem kesehatan dan ekonomi. Seperti yang dinyatakan oleh Ruggie (1992) bahwa *indivisibility* juga merujuk pada kepatuhan negara anggota. Dalam hal ini, negara G20 diharapkan mampu melaksanakan komitmen-komitmen yang telah disepakati.

#### **1. Komitmen G20 terhadap ACT-A dan Fasilitas COVAX**

Sebagaimana dalam respon kesehatan G20 melalui slogan “*no one is safe, until everyone is*” yang menunjuk pada pentingnya kerja sama kesehatan

antarnegara dalam meminimalkan laju penularan infeksi Covid-19. Tentu pada dasarnya, semua negara memperjuangkan langkah kebijakan yang paling tepat dalam menekan tingginya penularan infeksi, dengan vaksinasi menjadi opsi pemulihan terpenting. Forum G20 sebagai instrumen untuk mendorong kerja sama vaksin melalui *Access to Covid-19 Tools Accelerator* (ACT-A) dan *COVAX Facility* dengan memberikan upaya respon kesehatan yang pasti terhadap penyediaan dan penyaluran vaksin. *COVAX AMC (Advanced Market Commitment)* juga menyediakan vaksin bersubsidi penuh yang diberikan kepada negara yang memenuhi syarat. *COVAX* sendiri dipimpin bersama oleh WHO, Gavi, *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI), serta UNICEF sebagai mitra pelaksana.

G20 telah berkomitmen untuk mendukung kesenjangan pembiayaan ACT-A dalam penanganan respon Covid-19. Hal ini sangat penting bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah, yang telah memperoleh 80% dan 30% dosis masing-masing dari inisiatif *COVAX* (World Health Organization, 2021). Melalui mekanisme *fair share* dalam penentuan target kontribusi negara G20 yang diharapkan didasarkan pada PDB masing-masing negara dan keterbukaan ekonomi, sehingga negara dengan tingkat pendapatan per kapita tertinggi memberikan kontribusi yang lebih tinggi. Pembiayaan melalui mekanisme *fair share* ini dilakukan untuk mendukung pemerataan tes, perawatan, vaksin, dan alat pelindung melalui ACT-A. Dalam perhitungan Oktober 2020-2022, negara G20 berkontribusi pada pendanaan ACT-A, sebagaimana berikut:

Tabel 1. Kontribusi G20 pada Pendanaan ACT-A

Anggota G20	Total Fair Share (USD Juta)	Total Komitmen (USD Juta)	Total Komitmen Fair Share (%)
Jerman	3228	3903	121%
Kanada	1629	1476	91%
Arab Saudi	475	314	66%
Amerika Serikat	15764	7479	47%
Italia	1235	585	47%
Inggris	2583	1216	47%
Jepang	3863	1775	46%
Prancis	1969	521	26%
Australia	1227	216	18%
Korea	1248	212	17%
Brazil	801	87	11%
China	5645	116	2%
Indonesia	249	1	0.4%
Meksiko	663	1	0.2%
India	618	0	0%
Rusia	799	0	0%
Turki	446	0	0%
Argentina	237	0	0%
Afrika Selatan	17	0	0%

(World Health Organization, 2022).

Tabel 1. menunjukkan bahwa mayoritas negara G20 tidak memenuhi komitmen kontribusi *fair share*. Seperti pada Prancis hanya berkomitmen USD 521 juta dibandingkan dengan ekspektasi USD 2 miliar mengingat tingkat pendapatannya, atau 26% dari *fair share*. Sebaliknya, Jerman telah mengalokasikan 121% dari *fair share*.

Selain dari pada dukungan pendanaan, G20 berkomitmen menyediakan vaksin secara adil dan berimbang, tetapi pada realitanya memunculkan fenomena kesenjangan vaksin global di antara negara berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah.

Kesenjangan vaksinasi global terlihat signifikan dengan persentase penerimaan vaksin di negara maju sebesar 83 persen dan negara berkembang hanya 17 persen dari rantai pasokan, di mana 17 persen tersebut diperuntukkan kepada 47 persen populasi dunia pada pelaporan Mei tahun 2021. Di saat sejumlah negara telah memvaksinasi kelompok berisiko rendah seperti anak-anak dan usia belia, hanya ada 0,3 persen suplai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah (Kompas, 2021). Sedangkan pada September 2021, hanya sekitar tiga persen di negara berpenghasilan rendah telah divaksinasi dengan setidaknya hanya satu dosis dibandingkan 60,18 persen di negara berekonomi maju (United Nations, 2022).

Rata-rata negara G20 menerima pasokan dosis vaksin 15 kali lebih tinggi dari dosis yang diberikan per kapita ke negara-negara Afrika sub-Sahara dan 15 kali lebih tinggi dari dosis yang diberikan per kapita ke negara berpenghasilan rendah (UNICEF, 2021).

Negara G20 telah berkomitmen menyediakan vaksin ke negara-negara berkembang melalui donasi kelebihan dosis dan mempromosikan produksi dan pasokan penanggulangan medis kepada negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah dengan cara yang bertanggung jawab dan tepat waktu melalui COVAX (IFPMA, 2021). Amerika Serikat sendiri memimpin upaya internasional dan koordinasi untuk mempercepat akses ke vaksin yang aman dan efektif untuk memenuhi kebutuhan global. Hingga Desember 2022, Amerika telah mendonasikan 671 juta dosis vaksin ke 116 negara melalui mekanisme COVAX, Caricom, AVAT, dan secara bilateral, serta menyumbang USD 4

miliar kepada Gavi untuk mendukung COVAX dalam pendistribusian vaksin yang merata ke seluruh dunia (Share America, 2022).

Namun, dosis yang dijanjikan ini bergerak lambat. Dari 1,3 miliar dosis tambahan yang dijanjikan negara G20 untuk disumbangkan, hanya 356 juta dosis yang telah diberikan kepada COVAX. Negara-negara Afrika khususnya sebagian besar dibiarkan tanpa akses ke vaksin Covid-19. Kurang dari 5 persen populasi Afrika divaksinasi penuh, membuat banyak negara berisiko tinggi mengalami wabah yang lebih lanjut (UNICEF, 2021).

Kesenjangan ini juga didorong oleh rantai pasokan global vaksin yang terhambat. Seperti pada 7 Oktober 2021, COVAX *Facility* telah mengirimkan lebih dari 339 juta dosis ke 144 negara dan teritori dengan 262 juta di antaranya ke negara AMC. Jumlah ini sangat tertinggal dari target awal yakni 2 miliar dosis yang akan dikirimkan ke seluruh dunia hingga pada akhir 2021 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, 2021). Bahkan hingga 17 Januari 2022, COVAX masih hanya mengirimkan 1 miliar dosis ke 144 negara (Gavi, 2022). Kondisi ini kemudian menyebutkan fakta yang signifikan tentang adanya kesenjangan global atas akses vaksin Covid-19.

Hal ini semakin diperjelas melalui target vaksinasi yang diusulkan *Multi Leaders Taskforce* (MLT) — sebuah formasi yang didirikan oleh IMF, Bank Dunia, WHO, dan WTO — di mana setiap negara minimal memvaksinasi 40 persen dari total populasi pada akhir tahun 2021 dan minimal 70 persen pada pertengahan tahun 2022. Tercatat 36 negara hanya memvaksinasi kurang dari 10

persen dari jumlah populasinya hingga akhir tahun 2021, seperti negara-negara Afrika, Syria, Haiti, dan Afganistan (NPR, 2022).

Aliansi Afrika menyebutkan kurangnya akses terhadap vaksin dan sistem global yang tidak memprioritaskan negara-negara Afrika menjadi alasan negara-negara Afrika sulit mendapatkan pasokan vaksin (NPR, 2022). Negara-negara berpenghasilan tinggi mendapatkan manfaat dari *Advance Purchase Agreements* (APA) dengan perusahaan farmasi, dengan pemesanan di muka seringkali jauh melebihi kebutuhan. Hal ini untuk mengurangi risiko vaksin tidak berhasil dan jadwal produksi yang tidak pasti. Tetapi, hal tersebut sangat menghambat kemampuan negara-negara miskin untuk mendapatkan vaksin secara langsung dan kemampuan COVAX untuk mendapatkan vaksin bagi negara-negara AMC dan mengalokasikannya sesuai dengan prinsip WHO (Wouters et al., 2021). Hal ini mencerminkan fakta kemampuan negara maju dalam melakukan pembelian vaksin secara berlebihan dalam konteks kelangkaan vaksin telah mendorong ketidakseimbangan kekuatan global (Samman, 2022).

## **2. Upaya G20 terhadap Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respon (PPR) Pandemi**

Selain upaya G20 dalam mendanai dan mendonasikan vaksin yang merata ke negara berpenghasilan rendah dan menengah, juga penting untuk mengoordinasikan mekanisme jangka panjang dalam penguatan arsitektur kesehatan global. Dengan demikian, G20 mendukung upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon (PPR) terhadap pandemi yang akan datang. Selama tiga tahun, G20 telah menghadapi disrupsi yang menenggangkan ribuan korban

jiwa dan meruntuhkan perekonomian global. Adanya kesamaan kepentingan atau *indivisibility* ini mendorong G20 harus memastikan ketahanan komunitas internasional dalam menghadapi krisis pandemi.

G20 berupaya meningkatkan koordinasi dalam kesiapsiagaan terhadap risiko pandemi yang kemungkinan akan terjadi di masa mendatang. Melalui Presidensi G20 Italia, terdapat usulan untuk mengatur keuangan secara sistematis dan berkelanjutan guna mengurangi kerentanan dunia terhadap pandemi di masa depan. Hal ini menunjukkan kesepakatan G20 dalam tindakan untuk mencegah atau menghentikan pandemi berikutnya harus segera dilakukan. Oleh karena itu pada Oktober 2021, para pemimpin G20 berkomitmen untuk mengembangkan fasilitas keuangan untuk memastikan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan untuk PPR pandemi (Kementerian Keuangan, 2022a).

Melalui Satuan Tugas Keuangan dan Kesehatan G20 (*G20 Joint Finance-Health Task Force*) dalam meningkatkan kerja sama global tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon (PPR) terhadap pandemi, G20 mendorong tindakan kolektif pada upaya efektifitas penatagunaan sumber daya untuk kesiapsiagaan dan respon pandemi (PPR) serta meningkatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. G20 JFHTF ini secara inklusif berkoordinasi dengan WHO dan Bank Dunia, didorong oleh negara G20 dan melibatkan negara-negara berpenghasilan rendah serta menengah, mitra non-G20, dan Bank Pembangunan Multilateral dalam memastikan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi (G20 Rome Leaders' Declaration, 2021).



Kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan investasi dalam penguatan kapasitas negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah terkait PPR terhadap ancaman kesehatan global di masa depan, G20 JFHTF menunjukkan hasil nyata dengan dibentuknya *Pandemic Prevention Preparedness and Response Financial Intermediary Fund* (PPR-FIF) atau *Pandemic Fund* oleh Dewan Pengurusnya pada 8 September 2022 serta diluncurkan secara resmi pada KTT Presidensi G20 Indonesia di tengah pertemuan G20 JFHTF pada 13 November 2022 (World Bank, 2022c).

Berdasarkan kajian Bank Dunia dan WHO, *Pandemic Fund* membutuhkan pembiayaan USD 31,1 miliar setiap tahunnya untuk membiayai sistem PPR. Hingga KTT Presidensi G20 Indonesia, *Pandemic Fund* telah berhasil mengumpulkan dana sebesar USD 1,4 miliar yang telah dijanjikan oleh sejumlah kontributor, yakni negara G20, negara non-G20, dan lembaga-lembaga filantropi (World Bank, 2022d). Komitmen tersebut diperkirakan akan terus tumbuh seiring kepercayaan dan minat global untuk berkontribusi dalam peningkatan dana tersebut. Sekretariat *Pandemic Fund* akan mengintensifkan kinerja bersama Dewan Pengurus dan berkonsultasi dengan Bank Dunia, WHO, *Civil Society Organization* (CSO), dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu mengoperasionalkan dana tersebut.

*Pandemic Fund* memberikan aliran tambahan pembiayaan jangka panjang khusus untuk memperkuat kemampuan PPR di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah serta mengatasi kesenjangan kritis melalui investasi dan dukungan teknis di tingkat nasional, regional, dan global. Dana tersebut akan

memanfaatkan kekuatan dan keunggulan komparatif dari lembaga-lembaga utama yang terlibat dalam PPR, memberikan dukungan pelengkap, meningkatkan koordinasi di antara para mitra, mendorong peningkatan investasi negara, berfungsi sebagai platform untuk advokasi, dan meningkatkan penguatan sistem kesehatan (Povlo, 2022).

G20 JFHTF telah memainkan peranan penting dalam pengembangan dan desain *Pandemic Fund* untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk memperkuat PPR pandemi dan mengisi kesenjangan kapasitas di tingkat negara, regional, dan global (Kementerian Keuangan, 2022a). Upaya ini menggarisbawahi adanya komunikasi dan kolaborasi yang harus dipertahankan oleh negara G20 untuk mewujudkan upaya penguatan arsitektur kesehatan.

### **3. Komitmen G20 terhadap *Debt Service Suspension Initiative* (DSSI)**

Ketidakterpisahan kepentingan (*indivisibility*) G20 juga dilaksanakan pada upaya pemulihan ekonomi. Berbagai negara menghadapi momentum sinkronisasi penurunan pada berbagai sektor ekonomi. Kurangnya ruang fiskal negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam penanganan risiko kesehatan Covid-19 yang disebabkan oleh pembiayaan dialihkan ke pembayaran utang, menjadi perhatian global bahwa adanya ketidakmampuan negara-negara tersebut untuk mengendalikan laju penularan Covid-19. Sebagian besar negara kekurangan akses ke sumber daya tersebut sehingga bergantung pada bantuan multilateral.

G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi internasional, G20 mengimplementasikan rencana keringanan utang untuk membantu negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk mengatasi pandemi Covid-19, tekanan utang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pada Mei 2020, Bank Dunia dan IMF mendesak G20 untuk membentuk *Debt Service Suspension Initiative (DSSI)* atau Prakarsa Penangguhan Layanan Utang untuk negara-negara termiskin yang memintanya. Tujuan skema ini adalah untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah mengatasi pandemi Covid-19 dengan menangguhkan pembayaran utang luar negeri dari Mei 2020 hingga Desember 2020 dan membebaskan uang untuk dibelanjakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Melalui pertimbangan akan kebutuhan fiskal yang semakin meningkat dalam penanganan Covid-19, DSSI diperpanjang hingga Juni 2021 dan diperpanjang kembali hingga Desember 2021. Skema G20 menawarkan untuk menangguhkan pembayaran utang luar negeri kepada pemerintah lain (utang bilateral) untuk 73 negara yang memenuhi syarat. Terdapat 48 dari 73 negara yang memenuhi syarat berpartisipasi dalam prakarsa ini hingga akhir Desember 2021 (World Bank, 2022b).

Pada April 2020, G20 meminta kreditur swasta yang bekerja melalui Institut Keuangan Internasional (IFI) untuk berpartisipasi dalam inisiatif dengan persyaratan yang sebanding. G20 meminta bank pembangunan multilateral untuk mengeksplorasi lebih lanjut opsi penangguhan pembayaran layanan utang selama periode penangguhan. Untuk tahun 2020, G20 memperkirakan lebih dari

USD 20 miliar pembayaran utang yang akan ditangguhkan dengan pembayaran utang bilateral sebesar USD 12 miliar hingga USD 14 miliar dan pembayaran utang lebih lanjut sebesar USD 8 miliar kepada kreditur swasta eksternal. Hal ini kemudian akan membebaskan negara untuk mendanai penanganan pada sistem kesehatan dan memerangi pandemic Covid-19 (Reuters, 2020).

Skema DSSI yang diperpanjang hingga akhir tahun 2021, sehingga secara proporsional menunjukkan bahwa pembayaran utang yang ditangguhkan dengan tujuan awal USD 20 miliar selama delapan bulan (Mei-Desember 2020) seharusnya meningkat menjadi USD 35 miliar pada Juni 2021 dan USD 50 miliar pada akhir tahun 2021 (Jubilee Debt Campaign, 2021).

Namun, pada Desember 2021, IMF melaporkan bahwa G20 DSSI hanya menangguhkan pembayaran utang USD 12,9 miliar terhitung sejak awal Mei 2020 dan akhir Juni 2021 (World Bank, 2022b). Upaya G20 menjadi kurang optimal dalam meningkatkan langkah-langkah keringan utang. Hal ini dikarenakan G20 gagal meminta semua kreditur untuk berpartisipasi. Hanya 48 dari 73 negara berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat yang berusaha mengajukan inisiatif (penangguhan pembayaran utang) kepada kreditur bilateral resmi. Dikarenakan cakupan ruang lingkup pembayaran utang yang terbatas, pembayaran utang yang ditangguhkan hingga Juli 2021 hanya berjumlah USD 4,6 miliar dan hingga Desember 2021 berjumlah USD 12,9 miliar (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, 2022).

G20 terus meminta kreditur swasta untuk mengambil bagian dalam penangguhan, tetapi tidak mengambil tindakan apa pun untuk mendesak para

kreditur untuk berpartisipasi. Dikarenakan kreditur swasta tidak dituntut untuk berpartisipasi dalam penangguhan utang, hal ini menyebabkan pembayaran utang terus dibayar penuh selama pandemi. Kreditur swasta menerima sekitar USD 14,9 miliar pembayaran utang dari 48 negara sejak pandemi dimulai dan hanya menanggungkan 0,2% pembayaran. Jumlah ini menjadi jumlah terbesar dari semua kelompok kreditur. Sementara itu, lembaga multilateral menerima USD 10,4 miliar dalam pembayaran utang, meskipun IMF membatalkan USD 0,6 miliar pembayaran utang untuk 24 dari 48 negara. Pemerintah termasuk China, Prancis, dan Arab Saudi menanggungkan USD 10,3 miliar, tetapi masih menerima pembayaran USD 11 miliar dari negara-negara termiskin (Debt Justice, 2021).

Skema DSSI yang pada mulanya hanya berlaku untuk kreditur pemerintah bilateral dan tidak memaksa partisipasi semua kreditur swasta secara berarti. Hal ini menyebabkan pembayaran utang telah menguras sumber daya negara berpenghasilan rendah selama pandemi dan menghambat kemampuan negara-negara untuk mengatasi Covid-19 dan membangun pertumbuhan ekonomi kembali.

Selain kepada negara berpenghasilan rendah, DSSI harus diperluas untuk mencakup negara mana pun yang tertatih-tatih di ambang kebangkrutan di tengah respon terhadap pandemi Covid-19, terutama negara berpenghasilan menengah. Selama pandemi, negara-negara ini telah berjuang dari kurangnya ruang fiskal dan moneter untuk menangani penularan virus Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi. Berdasarkan Program Pembangunan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperkirakan bahwa antara tahun 2021–2025, minimal USD 598 miliar pembayaran layanan utang publik eksternal berisiko di 72 negara. Negara berpenghasilan menengah menyumbang 94 persen dari pembayaran ini. Hanya 49 dari 72 negara rentan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan di bawah skema penghentian utang dan restrukturisasi yang ada, menyisakan sekitar dua pertiga (USD387 miliar) dari pelayanan utang berisiko yang tidak tertutupi (UNDP, 2021).

DSSI diperlukan tetapi tidak cukup untuk mengatasi pelayanan utang berisiko. Hingga saat ini, 48 dari 73 negara yang memenuhi syarat telah mendaftar untuk prakarsa tersebut yang hanya memberikan sekitar seperempat dari potensi bantuannya. DSSI bersifat sementara dan bukan instrumen yang ditargetkan, dan kreditur swasta sejauh ini menolak ajakan untuk berpartisipasi (UNDP, 2021).

Merujuk dari *indivisibility* komitmen G20 ini, sebetulnya telah menunjukkan adanya ketidakterpisahan kepentingan di antara negara G20 dalam mendukung pemulihan di negara berpenghasilan rendah dan menengah melalui koordinasi kebijakan antara negara G20 dan lembaga internasional. Tetapi, pada implementasi komitmen tersebut masih sulit mencapai tujuan pemulihan yang setara. Di mana, komitmen terhadap ACT-A dan COVAX serta komitmen terhadap DSSI tidak maksimal dalam mengupayakan pemulihan di negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang mengakibatkan risiko pandemi masih terus berlanjut.

## **B. *Diffuse Reciprocity* terhadap Respon Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi dalam Rencana Aksi G20**

Ruggie (1992) menjelaskan bahwa multilateralisme yang berhasil dalam prakteknya akan menghasilkan harapan timbal balik yang membaur (*diffuse reciprocity*) atau manfaat secara setara di antara negara anggota (Ruggie, 1992). Dari upaya G20 untuk mengimplementasikan respon kesehatan dan pemulihan ekonomi secara multilateral ditemukan hasil yang kurang optimal pada komitmen ACT-A dan Fasilitas COVAX serta komitmen terhadap DSSI, meskipun pada komitmen PPR yang baru berjalan masih diharapkan dapat mencapai tujuannya.

Dukungan G20 untuk menyukseskan ACT-A dan Fasilitas COVAX telah gagal dalam mencapai akses vaksin yang adil dan berimbang di antara negara berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah. Kesenjangan pembiayaan dan vaksin di negara berpenghasilan rendah semakin menciptakan situasi mencekam pada sistem perawatan kesehatan yang tidak efektif, kemunculan varian virus Covid-19 baru yang lebih menular, dan pandemi yang terus-menerus berlanjut.

Dalam hal menciptakan manfaat yang setara oleh semua negara, terutama untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah, G20 diharapkan berkomitmen kembali pada solusi multilateral pada ACT-A dan Fasilitas COVAX dengan mendukung penuh seruan transparansi dalam pemerataan pasokan vaksin. Pada dasarnya, COVAX memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan produsen vaksin untuk lebih dari 4 miliar dosis, tetapi pendistribusian pasokan vaksin sering mengalami penundaan. Tidak ada

kejelasan pasti terkait antrean pesanan pasokan vaksin perusahaan, sehingga sulit untuk mengetahui apakah penundaan distribusi vaksin disebabkan oleh tantangan produksi atau perlakuan istimewa dalam pengaturan bilateral. Dengan mendesak komitmen produsen bersikap transparan tentang jadwal pesanan dapat memastikan kesempatan memperoleh pasokan dosis vaksin yang setara, terutama pada negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak lagi terbentur ke belakang antrean vaksin karena kesepakatan bilateral lainnya (Gavi, 2021).

Selain itu, G20 harus menjadikan akses vaksin global sebagai prioritas tertinggi. Besarnya kesenjangan vaksinasi di negara berpenghasilan rendah akibat penimbunan pasokan vaksin oleh negara maju. Negara-negara dengan pesanan dosis yang sementara masih belum dibutuhkan harus mengizinkan COVAX untuk mengambil posisi antrean tersebut agar dapat mengirimkan dosis ke negara yang membutuhkan pasokan vaksin Covid-19 segera. Terakhir, negara-negara berpenghasilan rendah memerlukan dukungan finansial dan teknis yang berkelanjutan untuk peluncuran vaksin Covid-19. Melalui penguatan sistem kesehatan nasional akan membantu negara-negara dalam memastikan pengiriman dosis dan mengurangi efek sekunder pandemi, serta menyisakan infrastruktur penting untuk keamanan kesehatan global di masa depan (Gavi, 2021).

Di satu sisi, upaya G20 terhadap sistem pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon (PPR) terhadap pandemi mencapai kemajuan. Pada 14 November 2022, G20 meresmikan program *Pandemic Fund* yang diusung atas dasar penguatan arsitektur kesehatan global untuk mewujudkan sistem kesehatan yang andal,



inklusif, dan berkeadilan. Berdasarkan hasil riset dan koordinasi Bank Dunia dan WHO, *Pandemic Fund* membutuhkan pembiayaan sebesar USD 31,1 miliar setiap tahunnya untuk meningkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi di masa yang akan datang.

Upaya kolektif, berkesinambungan dan penuh komitmen yang telah dilakukan oleh G20 JFHTF, Bank Dunia, dan IMF, terutama kepada para donor dari negara G20, negara non-G20, serta lembaga filantropi yang telah berkontribusi dalam *Pandemic Fund*. *Pandemic Fund* ditargetkan sebagai katalisator sumber dana penanggulangan pandemi jangka panjang, insentif bagi negara-negara untuk meningkatkan investasinya di PPR, dan memperkuat koordinasi antar organisasi internasional. *Pandemic Fund* akan memainkan peran kunci dalam menjembatani kerja sama antara anggota G20, baik negara maju maupun negara berkembang, anggota non-G20, dan pemangku kepentingan, termasuk filantropis, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil (CSO). *Pandemic Fund* menunjukkan kepada dunia bahwa G20 mampu menghasilkan tindakan nyata yang dapat berdampak global (Kementerian Keuangan, 2022b).

Melalui inisiatif dari program ini, G20 akan menerima manfaat dalam jangka waktu yang panjang, sebagaimana hal ini kemudian akan memajukan arsitektur kesehatan global dan menciptakan manfaat yang membaur (*diffuse reciprocity*) kepada semua negara G20 maupun non-G20.

Sementara itu, dari sisi komitmen G20 terhadap DSSI mengalami kegagalan. Dari 73 negara berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat DSSI,

hanya 48 negara yang mengajukan penangguhan layanan utang dengan DSSI hanya menangguhkan USD 12,9 miliar terhitung dari April 2020 – Desember 2021. Tetapi, menjadi sebuah fakta bahwa DSSI hanya menangguhkan sementara pembayaran utang bilateral dan kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam skema tersebut menyebabkan mekanisme tersebut menjadi tidak efektif. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya desakan G20 kepada kreditur sektor swasta untuk menerapkan keringanan utang melalui skema DSSI.

DSSI seharusnya tidak membebaskan ruang fiskal bagi negara berpenghasilan rendah yang berjuang melawan Covid-19 untuk melakukan pembayaran utang kepada kreditur swasta. Negara-negara yang menghadapi kesulitan utang memerlukan ruang fiskal yang memadai untuk mengatasi dampak kesehatan Covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi berkelanjutan, sehingga G20 perlu untuk mendesak semua kreditur untuk berpartisipasi.

Namun, upaya G20 untuk mengatasi kesinambungan utang di tengah krisis global yang mendesak ini telah memberikan keringanan utang meskipun hanya mencapai 12,9 miliar penangguhan layanan utang. Tetapi, tindakan tersebut masih belum cukup mengingat pada situasi ketika negara-negara ekonomi maju mengalami pemulihan ekonomi akan menyebabkan kenaikan suku bunga, memicu arus keluar modal, dan depresiasi nilai tukar di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini dapat menggelembungkan utang luar negeri dan semakin memperburuk situasi krisis di negara-negara berpenghasilan rendah.

Meskipun DSSI menyediakan likuiditas yang sangat dibutuhkan sejumlah besar negara, DSSI tidak dirancang untuk menangani masalah utang struktural

atau tantangan pembiayaan yang berlarut-larut. Berakhirnya G20 DSSI pada Desember 2021 menandakan bahwa negara-negara akan melanjutkan pembayaran kewajiban utang meskipun krisis global belum berakhir. Secara keseluruhan, pemulihan yang sudah rapuh di negara berpenghasilan rendah mulai terlihat semakin genting (CGD, 2022).

Berdasarkan paparan tersebut, *diffuse reciprocity* atau manfaat yang setara tidak ditemukan pada pemulihan di negara berpenghasilan rendah dan menengah akibat kesenjangan vaksin dan penanggungan layanan utang yang tidak maksimal. Di satu sisi, komitmen PPR yang diperuntukkan untuk penguatan kesiapsiagaan arsitektur kesehatan di negara berpenghasilan rendah dan menengah telah menunjukkan keberhasilannya melalui pembiayaan yang telah diinvestasikan, meskipun PPR ini masih terus diharapkan dapat mencapai tujuannya untuk negara-negara berisiko di masa pandemi.

Pada dasarnya, G20 telah berupaya dalam menyambung pemulihan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, meskipun hasil dari implementasi masih menyebabkan krisis yang berlanjut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi berbagai tatanan global. Tingginya angka penularan infeksi Covid mendorong negara-negara untuk memberlakukan pembatasan sosial (*lockdown*). Tetapi pada saat yang sama, pembatasan pergerakan sosial ini justru menghadirkan tantangan baru pada penurunan perekonomian global dan mengakibatkan negara-negara mengalami resesi ekonomi. Tantangan kesehatan, sosial, dan ekonomi yang secara bersamaan dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara G20, mendorong kerja sama multilateral untuk bersama-sama menekan kerusakan jangka panjang akibat pandemi Covid-19.

G20 menunjukkan respon dan konsesusnya dalam respon kolektif yang tertuang dalam Rencana Aksi G20 yang terdiri atas komitmen-komitmen dari koordinasi kebijakan negara anggota serta koordinasi dengan jaringan global. Melalui multilateralisme, G20 telah berkomitmen untuk mendukung pemulihan negara-negara yang rentan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Berdasarkan dari hasil analisa penelitian ini, peneliti menemukan beberapa indikator yang menjelaskan kerja sama multilateral G20 dalam strategi respon kesehatan dan pemulihan ekonomi terhadap Covid-19 melalui Rencana Aksi G20 masih belum mencapai keberhasilan.

1. Ketidakterpisahan kepentingan (*indivisibility*) G20 mengindikasikan kepentingan nasional yang sama dengan negara G20 lainnya untuk mengatasi kerentanan sistem kesehatan dan penurunan perekonomian global. Hal ini kemudian mendorong G20 dan lembaga internasional untuk saling mengordinasikan kebijakan yang kemudian menghasilkan komitmen-komitmen dalam merespon pandemi Covid-19. Tetapi dalam implementasinya, G20 belum secara optimal mengupayakan kesetaraan vaksinasi pada komitmen ACT-A dan Fasilitas COVAX mengenai kesenjangan dan pembiayaan vaksinasi antara negara berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah. Di saat yang sama, komitmen terhadap DSSI yang tidak maksimal masih melonggarkan para kreditur swasta menerima pembayaran utang oleh negara berpenghasilan rendah yang mengakibatkan respon terhadap pandemi Covid-19 di negara tersebut tidak berjalan efektif. Di situasi berbeda, G20 mencapai keberhasilan dalam peresmian *Pandemic Fund* untuk mendukung pembiayaan pandemi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Inisiatif ini masih diharapkan dapat mencapai tujuannya.
2. Multilateralisme yang berhasil memberikan manfaat yang setara (*diffuse reciprocity*). G20 telah berupaya mendorong pemulihan di negara-negara rentan dengan melakukan sejumlah komitmen Rencana Aksi G20. Tetapi dukungan tersebut tidak menciptakan manfaat yang setara di antara negara berpenghasilan tinggi dan negara berpenghasilan rendah ataupun menengah pada inisiatif ACT-A COVAX dan DSSI. Sebaliknya, inisiatif *Pandemic*

*Fund* masih belum menunjukkan manfaat yang setara, tetapi melalui pembiayaan oleh para donor G20, non-G20, dan lembaga filantropi diharapkan dapat mendorong manfaat yang setara bagi negara-negara rentan ketika menghadapi pandemi di masa yang akan datang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari analisa penelitian ini, peneliti merekomendasikan dan memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk menelaah lebih lanjut terkait kerja sama multilateral G20 dalam menopang pemulihan yang berkelanjutan di negara berpenghasilan rendah dan menengah pasca pandemi Covid-19, terutama pada inisiatif *Pandemic Fund* yang perlu untuk melihat kelanjutan dari implementasinya yang mendukung penguatan arsitektur kesehatan di negara-negara yang rentan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W. R. D. (2020). Kerja Sama G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global dari COVID-19. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(2), 131. <https://doi.org/10.25077/ajis.9.2.131-148.2020>
- Bureau of Labor Statistics. (2020). *Unemployment rate rises to record high 14.7 percent in April 2020*. The Economics Daily. <https://www.bls.gov/opub/ted/2020/unemployment-rate-rises-to-record-high-14-point-7-percent-in-april-2020.htm>
- CGD. (2022, January 18). *Fix the Common Framework for Debt Before It Is Too Late | Center for Global Development | Ideas to Action*. CGD. <https://www.cgdev.org/blog/fix-common-framework-debt-it-too-late>
- Charles P. Kindleberger. (1986). International Public Goods without International Government on JSTOR. *The American Economic Review*, 76(1), 1–13. <https://www.jstor.org/stable/1804123>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Davies, R. (2015). The Indivisibility of Prosperity: the G20's Development Agenda. In *The G20 and the Future of International Economic Governance*. UNSW Press. [https://www.researchgate.net/publication/327497991\\_The\\_indivisibility\\_of\\_prosperity\\_the\\_G20's\\_development\\_agenda](https://www.researchgate.net/publication/327497991_The_indivisibility_of_prosperity_the_G20's_development_agenda)
- Debt Justice. (2021, October 12). *G20 initiative leads to less than a quarter of debt payments being suspended - International Debt Charity | Debt Justice (formerly Jubilee Debt Campaign)*. Debt Justice. <https://debtjustice.org.uk/press-release/g20-initiative-leads-to-less-than-a-quarter-of-debt-payments-being-suspended>
- G20. (2020). *Communiqué: G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, April 15, 2020*. <http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-finance-0415.html>

- G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting. (2020). *G20 Action Plan*. April 15, 1. [https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/world/G7-G20/G20-Documents/2020-04-15-Finance-Ministers-Central-Bank-Governors-Meeting.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=4](https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/world/G7-G20/G20-Documents/2020-04-15-Finance-Ministers-Central-Bank-Governors-Meeting.pdf?__blob=publicationFile&v=4)
- G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting. (2021). Fourth Progress Report on the G20 Action Plan. *Federal Ministry of Finance*, October 13. [https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/world/G7-G20/G20-Documents/Italy/2021-10-13-g20-annex-1.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=2](https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/world/G7-G20/G20-Documents/Italy/2021-10-13-g20-annex-1.pdf?__blob=publicationFile&v=2)
- G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting. (2022). *Communiqué*. February 2022, 1–8. <https://www.bi.go.id/en/G20/Documents/G20-Communique.pdf>
- G20 Riyadh Summit. (2020a). *G20 Support to COVID-19 Response and Recovery in Developing Countries*. 1–7.
- G20 Riyadh Summit. (2020b, March 26). *Extraordinary G20 Leaders' Summit: Statement on COVID-19*. G20 Research Group. <http://www.g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-statement-0326.html>
- G20 Rome Leaders' Declaration. (2021). *G20 Rome Leaders' Declaration*. April, 1–20.
- G20 Russia Presidency. (2013). *G20 5th Anniversary Vision Statement*. G20 Research Group. <http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0906-vision.html>
- G20 Summit 2016. (2015, December). *G20 Summit 2016, China*. [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bQDtuRcv\\_BcJ:www.g20.utoronto.ca/2016/151201-xi-en.pdf&cd=3&hl=ban&ct=clnk&gl=id](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bQDtuRcv_BcJ:www.g20.utoronto.ca/2016/151201-xi-en.pdf&cd=3&hl=ban&ct=clnk&gl=id)
- Gavi. (2021, September 6). *The G20 Must Recommit to COVAX | Gavi, the Vaccine Alliance*. Gavi. <https://www.gavi.org/vaccineswork/g20-must-recommit-covax>
- Gavi. (2022). *COVAX vaccine roll-out | Gavi, the Vaccine Alliance*. Gavi. <https://www.gavi.org/covax-vaccine-roll-out>



- IFPMA. (2021, May 21). *COVID-19 vaccine makers invite G20 leaders to support the five steps to urgently advance COVID-19 vaccine equity - IFPMA*. IFPMA. <https://ifpma.org/news/covid-19-vaccine-makers-invite-g20-leaders-to-support-the-five-steps-to-urgently-advance-covid-19-vaccine-equity/>
- IMF. (2020). *World Economic Outlook Update, June 2020: A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery*. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020>
- James, S. (2022). *Multilateralism*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/multilateralism>
- Jubilee Debt Campaign. (2021). How the G20 debt suspension initiative benefits private lenders. *Jubilee Debt Campaign, October*, 1–8. [https://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2021/10/How-the-G20-debt-suspension-initiative-benefits-private-lenders\\_10.21.pdf](https://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2021/10/How-the-G20-debt-suspension-initiative-benefits-private-lenders_10.21.pdf)
- Kementerian Keuangan. (2022a, September 9). *Apresiasi Pertemuan Pertama Dewan Pengurus PPR-FIF, Menkeu : Pertemuan Ini Tonggak Penting Penguatan Arsitektur Kesehatan Global*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Apresiasi-Pertemuan-Pertama-Dewan-Pengurus-PPR-FIF>
- Kementerian Keuangan. (2022b, November 13). *Pandemic Fund: Langkah Konkret G20 yang Berdampak Global*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pandemic-Fund-Langkah-Konkret-G20>
- Keohane, R. O. (1986). Reciprocity in international relations. *International Organization*, 40(1), 1–27. <https://doi.org/10.1017/S0020818300004458>
- Keohane, R. O. (1990). Multilateralism: An Agenda for Research. *International Journal*, 45(4), 731. <https://doi.org/10.2307/40202705>
- Kompas. (2021). *Bahas Kesenjangan Vaksin Covid-19 di Dunia, Jokowi: Negara Berkembang Hanya Dapat 17 Persen*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/22/06070451/bahas-kesenjangan-vaksin-covid-19-di-dunia-jokowi-negara-berkembang-hanya>

- Lin, G., Hu, Z., & Hou, H. (2018). Research preferences of the G20 countries: A bibliometrics and visualization analysis. *Current Science*, 115(8), 1477–1485. <https://doi.org/10.18520/CS/V115/I8/1477-1485>
- Maull, H. W. (2020). *Multilateralism*. 9.
- NPR. (2022, January 14). *Interactive map shows global COVID vaccination rates. 36 nations are under 10%: Goats and Soda: NPR*. NPR. <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2022/01/14/1072188527/for-the-36-countries-with-the-lowest-vaccination-rates-supply-isnt-the-only-issu>
- OECD. (2020). OECD Economic Outlook, Interim Report September 2020. *OECD Publishing*. <https://doi.org/10.1787/34FFC900-EN>
- OECD. (2021). *Data show how the COVID-19 pandemic has hit all aspects of people's well-being - OECD*. <https://www.oecd.org/newsroom/data-show-how-the-covid-19-pandemic-has-hit-all-aspects-of-peoples-well-being.htm>
- Povlo, J. (2022, November). *G20 Event Recap: Redesigning Pandemic Prevention, Preparedness, and Response – Joep Lange Institute*. Joep Lange Institute. <https://www.joeplangeinstitute.org/featured/g20-event-recap-redesigning-pandemic-prevention-preparedness-and-response/>
- Reuters. (2020, April 15). *G20 countries agree debt freeze for world's poorest countries | Reuters*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-g20-statement-idUSKCN21X29A>
- Ruggie, J. G. (1992). Multilateralism: the anatomy of an institution. *International Organization*, 46(3), 561–598. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027831>
- Samman, E. (2022). *Monitoring G20 contributions to global Covid-19 vaccine equity: issues and options*. <https://odi.org/en/publications/monitoring-g20-contributions-to-global-covid-19-vaccine-equity-issues-and-options/>
- Scharpf, F. W. (1999). *Governing in Europe: Effective and democratic?* Oxford University Press. <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/21979>
- Share America. (2022, December 29). *U.S. sends COVID-19 vaccines worldwide [December 2022] | ShareAmerica*. Share America. <https://share.america.gov/us-sends-covid-19-vaccines-worldwide-december-2022/>

- Sherpa G20 Indonesia. (2022). *History of the G20*.  
<https://sherpag20indonesia.ekon.go.id/public/en/history-of-the-g20>
- Szczepański, M., & Bassot, E. (2015). *The Group of Twenty (G20): Setting the Global Agenda*. January, 1–12.  
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/545712/EPRS\\_BRI\(2015\)545712\\_REV1\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/545712/EPRS_BRI(2015)545712_REV1_EN.pdf)
- UNDP. (2021, April 1). *New UNDP study reveals the magnitude of limited debt relief eligibility for developing economies | United Nations Development Programme*. UNDP. <https://www.undp.org/press-releases/new-undp-study-reveals-magnitude-limited-debt-relief-eligibility-developing-economies>
- UNICEF. (2021, October 27). *G20 members have received 15 times more COVID-19 vaccine doses per capita than sub-Saharan African countries*. UNICEF. <https://www.unicef.org/press-releases/g20-members-have-received-15-times-more-covid-19-vaccine-doses-capita-sub-saharan>
- Unidas, N. (2021). Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean 2020. *ECLAC*.  
<https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46504>
- United Nations. (2021). *The impact of COVID-19 on the LDC category*. 13(13).  
<https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/CDP-excerpt-2021-2.pdf>
- United Nations. (2022). *UN analysis shows link between lack of vaccine equity and widening poverty gap*. United Nations.  
<https://news.un.org/en/story/2022/03/1114762>
- World Bank. (2021, July 28). *Debt Service Suspension Initiative*. World Bank.  
<https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/05/11/debt-relief-and-covid-19-coronavirus>
- World Bank. (2022a). *COVID-19 (Coronavirus) Response in Africa*. World Bank.  
<https://www.worldbank.org/en/region/afr/coronavirus>
- World Bank. (2022b, March 10). *Debt Service Suspension Initiative*. World Bank.  
<https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative>

- World Bank. (2022c, June 30). *FAQs: Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/pandemics/brief/factsheet-financial-intermediary-fund-for-pandemic-prevention-preparedness-and-response>
- World Bank. (2022d, September 9). *New Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response Formally Established*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/09/09/new-fund-for-pandemic-prevention-preparedness-and-response-formally-established>
- World Health Organization. (2020a). *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 71* (Issue March). <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general->
- World Health Organization. (2020b). *COVID-19 Strategy update*. <https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-strategy-update>
- World Health Organization. (2020c). *Weekly epidemiological update - 31 August 2020*. <https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---31-august-2020>
- World Health Organization. (2021). ACT-Accelerator Strategic Plan & Budget: October 2021 to September 2022. In *WHO*. World Health Organizations. <https://www.who.int/publications/m/item/act-accelerator-strategic-plan-budget-october-2021-to-september-2022>
- World Health Organization. (2022). *Access to COVID-19 tools funding commitment tracker*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-tracker>
- Wouters, O. J., Shadlen, K. C., Salcher-Konrad, M., Pollard, A. J., Larson, H. J., Teerawattananon, Y., & Jit, M. (2021). Challenges in ensuring global access to COVID-19 vaccines: production, affordability, allocation, and deployment. *Lancet (London, England)*, 397(10278), 1023. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00306-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00306-8)